



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Jalan Pasanggrahan No. 03 Desa Buniwangi
Palabuhanratu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi ini dapat kami susun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021.

Dengan telah tersusunnya renstra ini, maka diharapkan arah pembangunan dibidang ke Pekerjaan Umum di Kabupaten Sukabumi akan lebih jelas dan terarah dalam 5 tahun kedepan. Untuk operasionalisasinya, renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Renja yang disusun merupakan penjabaran secara rinci dari apa yang telah dituangkan didalam renstra, merupakan rencana kerja selama satu tahun kedepan dan dibuat disetiap awal tahun anggaran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan bagi tersusunnya renstra ini. Semogarenstra ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu jalan bagi tercapainya visi Kabupaten Sukabumi, yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri.***

Palabuhanratu, 30 Desember 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sukabumi

Ir. Lukman Sudrajat

Pembina Tk. I

NIP. 196507311994031005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI	15
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	15
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	30
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	56

4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi.....	56
4.2.	Strategi dan Kebijakan	60
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	65
5.1.	Rencana Program	65
5.2.	Kegiatan	66
5.3.	Indikator Kinerja	67
5.4.	Kelompok Sasaran	67
5.5.	Pendanaan Indikatif	69
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII	PENUTUP	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Distribusi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017	19
Tabel II.2	Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	19
Tabel II.3	Perkembangan Dana Alokasi Untuk Penanganan Jalan Desa	24
Tabel II.4	Pencapaian SPM	24
Tabel II.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat)	25
Tabel II.6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Pengujian Bahan) Tahun 2007 s/d 2016	26
Tabel III.1	Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum	37
Tabel III.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas pekerjaan Umum Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
Tabel III.3	Indikator Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	68
Tabel III.4	Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten	75
Tabel III.5	Arahan RTRW Kabupaten/Kota untuk Bidang Cipta Karya	82
Tabel III.6	Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) berdasarkan RTRW.....	82
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerja Umum	93
Tabel IV.2	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	100
Tabel V.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum	107
Tabel VI.2	Indikator Kinerja Dinas Pekerja Umum dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sukabumi	12
Gambar II.2	Kondisi Jalan Kabupaten Sukabumi	21
Gambar II.3	Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten	22
Gambar II.4	Kondisi Jembatan Kabupaten	22
Gambar II.5	Perkembangan Alokasi Dana untuk Penanganan Jalan Kabupaten.....	23
Gambar II.6	Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan	23
Gambar III.2	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi	74
Gambar III.3	Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Sukabumi	80
Gambar III.4	Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan tingkat kerusakan Jalan	85
Gambar III.5	Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan Waktu	86

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sukabumi, disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi pada periode Tahun 2010-2015 serta isu-isu strategis serta faktor-faktor strategis lingkungan dalam 5 (lima) tahun mendatang baik pada tingkat nasional maupun wilayah provinsi serta dilengkapi sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 tersebut disusun sebagai mana yang diamanatkan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021, maka setiap SKPD/ OPD wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk Tahun 2016–2021.

Berkenaan dengan hal itu, merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dicapai selama periode tahun 2010 – 2015 dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun untuk menjadi dasar pola Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi, dan potensi daerah, dengan ciri-ciri menonjolnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2016- 2021 pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholders.

Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat. Mengingat peran penting PU dalam hal pelayanan publik tersebut dan juga besarnya tantangan yang dihadapi, yaitu sangat besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan dihadapkan keterbatasan sumber daya, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang dapat memberikan arahan dan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan rencana pelaksanaan yang realistis, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dibuat suatu perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sampai 2021 yang merupakan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021. Rencana Strategis tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada serta peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi disusun berlandaskan aturan perundangan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437)

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 52 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Maka setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RenstraDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan pembangunan di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sukabumi pada periode tahun 2016 – 2021 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 bertujuan

untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu kepada kebijakan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) tingkat nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis adalah suatu proses formal yang terstruktur yang selalu mengkaji dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman yang setiap saat berubah (SWOT analysis). Renstra adalah Dokumen Perencanaan Strategis. Manfaat Perencanaan Strategis adalah :

1. **Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.** Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dan menurunnya baik kualitas maupun kuantitas sumberdaya. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan perubahan secara proaktif bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
2. **Untuk pengelolaan keberhasilan.** Dengan Perencanaan Strategis organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. **Agar organisasi berorientasi pada masa depan.** Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.
4. **Agar organisasi dapat bersifat adaptatif.** Perencanaan Strategis harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada untuk menangkap peluang. Walaupun demikian, capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil, tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategis.
5. **Meningkatkan Pelayanan Prima.** Kepuasan pelanggan merupakan factor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Karena itu, pola-pola pelayanan yang

perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

6. **Meningkatkan Komunikasi.** Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.
7. **Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi.** Berbagai sumber dapat digunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas-prioritas kunci.
8. **Meningkatkan Produktifitas.** Produktifitas organisasi ditingkatkan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Untuk merumuskan dan mempersiapkan Perencanaan Strategis, organisasi harus melakukan hal-hal yang bersifat mendasar, yaitu :

- Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara-cara untuk mencapainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perencanaan Strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya;
- Mengenali lingkungan strategis dimana organisasi akan mengimplementasikan interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat;
- Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam memposisikan organisasi dalam memperebutkan kepercayaan masyarakat;
- Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan organisasi;
- Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi PerencanaanStrategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan pimpinan organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian maka metoda penyusunan perencanaan strategis dilakukan melalui proses pembelajaran bersama seluruh unit/sub-unit organisasi, sehingga hasilnya merupakan keputusan bersama

seluruh jajaran organisasi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dalam menyusun Perencanaan Strategis, Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, melakukan :

1. Pengamatan lingkungan, dengan menganalisis pengaruh faktor lingkungan baik internal terhadap struktur dan budaya organisasi maupun faktor lingkungan eksternal organisasi seperti lingkungan sosial dan lingkungan tugas;
2. Perumusan Strategi, didalamnya melaksanakan penyusunan visi, misi, tujuan, strategi serta kebijakan organisasi secara bersama-sama;
3. Implementasi Strategi, sebagai bagian yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan organisasi dengan merencanakan Program/ Kegiatan, Anggaran dan Prosedur;
4. Penyusunan sistem umpan balik dalam rangka evaluasi tingkat efektivitas pencapaian pelaksanaan Renstra.

Adapun sistematika dalam penyusunan Renstra sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, manfaat dan sistematika penulisan;

Bab II Gambaran Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Menjelaskan struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, tugas pokok dan fungsi dan kondisi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berisi isu–isu strategis yang mempengaruhi dan akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi;

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi latar belakang pemikiran dan uraian visi Pemerintah Daerah serta penjabarannya, sebagai pendorong untuk menentukan tujuan dan sasaran serta strategi dalam mencapai visi dan misi;

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Berisi rencana program dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran tahunannya yang akan dicapai dari setiap tujuan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai program dengan diperjelas oleh indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan, sesuai dengan tupoksi Dinas serta strategi kesiapan dukungan pendanaan indikatif;

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah

Berisi indikator kinerja/sasaran hasil pembangunan, kelompok sasaran dan juga lokasi/satuan wilayah atau kawasan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bab VII Penutup

Berisi harapan pencapaian sasaran dan tujuan sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen serta konsistensi bersama antara Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2016 – 2021.

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan fungsi:

Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 52 tahun 2016 tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang perencanaan teknis; bina marga: pengairan; Bangunan dan penyehatan lingkungan; bidang alat berat dan laboratorium; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
4. Penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;

5. Pengendalian dan pengawasan pasca penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
6. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
7. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
8. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum;
9. Penerbitan rekomendasi untuk usulan penetapan status jalan desa dari pemerintah desa kepada Bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2.1.1 Struktur Organisasi.

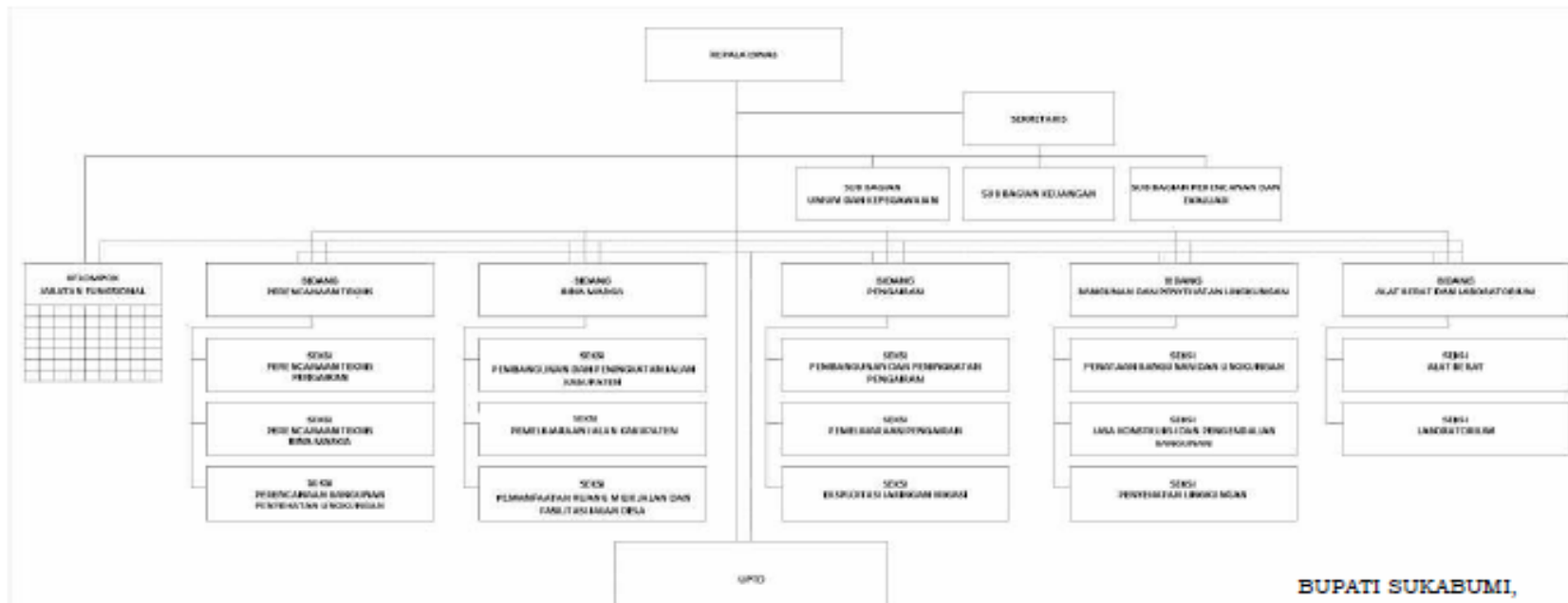
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan :
 - Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 - Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga; dan
 - Seksi Perencanaan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten;
 - Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten; dan
 - Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Fasilitas Jalan Desa.
- e. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan;

- Seksi Pemeliharaan Pengairan; dan
 - Seksi Eksploitasi Jaringan Irigasi.
- f. Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
- Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - Seksi Jasa Konstruksi dan Pengendalian Bangunan; dan
 - Seksi Penyehatan Lingkungan.
- g. Bidang Alat Berat dan Laboratorium, membawahi:
- Seksi Alat Berat; dan
 - Seksi Laboratorium.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 52 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM



————— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOORDINASI

BUPATI SUKABUMI,
 TTD
 MARWAN HAMAMI

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1 Sumber Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi tahun 2015 adalah sebanyak 251 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Distribusi pegawai menurut Pangkat/Golongan.

Tabel II. 1 Distribusi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017

No.	Golongan	Jumlah
1	I	49
2	II	107
3	III	91
4	IV	4
Jumlah		251

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian

- b. Distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan

Tabel II. 2 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Non Teknik/Teknik		Jumlah
		Non Teknik	Teknik	
1	SD	26		26
2	SLTP	32		32
3	SLTA	63	53	116
4	DIPLOMA 3	3	16	19
5	S1	25	29	54
6	S2	3	1	4
Jumlah		152	99	251

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian

Apabila dilihat dari jumlahnya, maka sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan sudah mencukupi. Kekurangan yang ada adalah dalam hal kompetensi pegawai. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan atau merekrut pegawai baru sesuai kebutuhan, khususnya tenaga teknik sipil.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas. Sarana dan prasarana ini mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas dinas. Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa:

- Gedung–gedung
- Peralatan laboratorium tanah, aspal dan beton,
- Kendaraan–kendaraan operasional roda–4, roda–3 dan roda–2
- Alat–alat berat (mesin gilas, back hoe, wheel loader, dll).
- Meja dan kursi kerja
- Komputer, plotter, printer.
- Alat ukur (theodolit, GPS), dll

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan pelayanan yang cukup luas. Pelayanan yang diberikan dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian besar, yaitu kesekretariatan, bidang bina marga, bidang pengairan, bidang Bangunan dan penyehatan Lingkungan, bidang alat berat dan laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Adapun kinerja pelayanan setiap kelompok dapat digambarkan sebagai berikut:

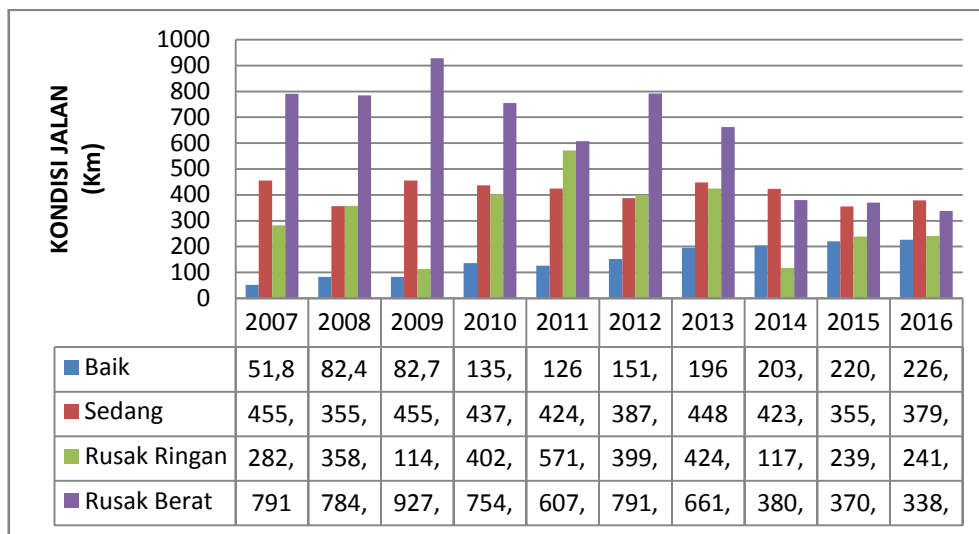
2.2.3 Kinerja Pelayanan Kesekretariatan

Pelayanan kesekretariatan secara umum adalah menyangkut penyelenggaraan administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum, keuangan, dan perencanaan dan program. Pelayanan kesekretariatan selama ini berjalan cukup lancar, walaupun terkadang terdapat kendala yang berakibat pada terjadinya sedikit keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Hal ini disebabkan diantaranya oleh keterbatasan kemampuan SDM, peralatan, dan pendanaan.

Salah satu tugas terberat kesekretariatan adalah dalam hal pengelolaan aset dan perencanaan dan penyusunan program. Tugas ini menyangkut manajemen pengelolaan infrastruktur yang sangat besar nilainya. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang benar–benar kapabel dan sumber daya lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kesekretariatan secara keseluruhan.

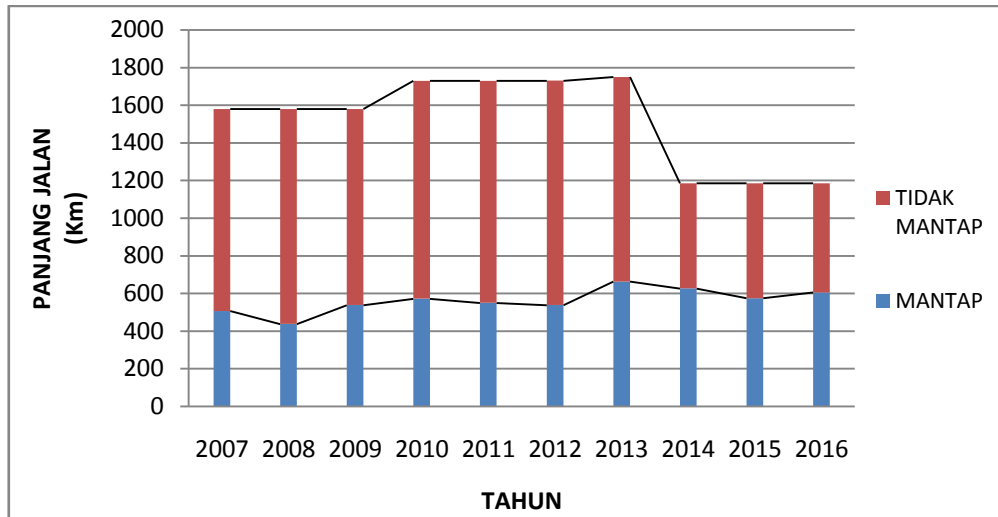
2.2.4 Kinerja Pelayanan bidang bina marga.

Kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dilihat salah satunya dari perkembangan kondisi jalan kabupaten dari tahun ke tahun. Kondisi jalan kabupaten dapat diklasifikasikan menjadi kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) dan kondisi tidak mantap (kondisi rusak ringan dan rusak berat). Perkembangan Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2015 dapat dilihat pada **Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten**. Dengan melihat kriteria tersebut, maka kondisi yang diinginkan (yang menjadi target) adalah panjang jalan dengan kondisi jalan mantap.



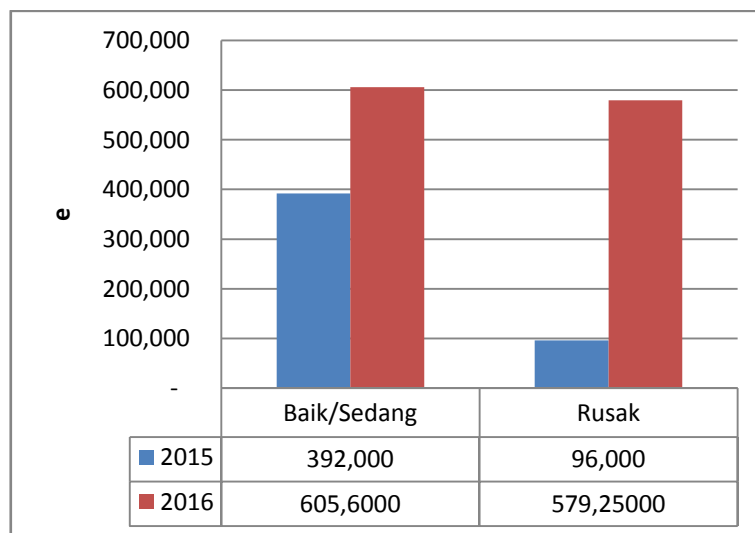
Gambar II. 2Kondisi Jalan Kabupaten Sukabumi

Perkembangan kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2016 dapat dilihat pada **Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten**. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten relatif tetap, berkisar pada kondisi 30% jalan mantap. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dikatakan kurang karena pencapaian kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2016 relatif tetap, artinya penambahan kemantapan jalan kabupaten **tidak signifikan**.



Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten

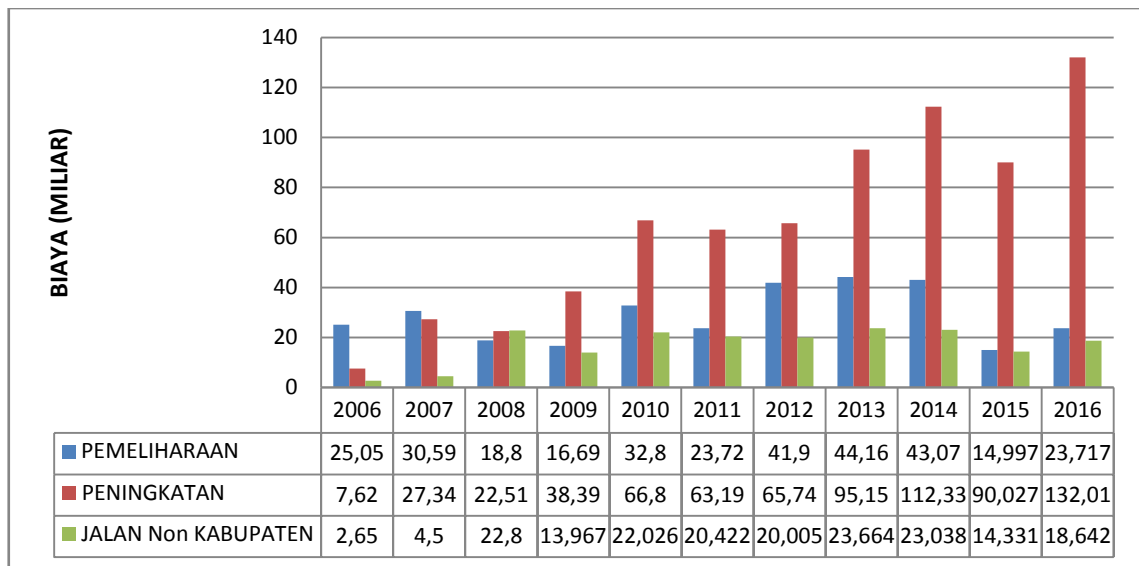
Sedangkan perkembangan kemantapan jembatan kabupaten pada tahun 2015 dapat dilihat pada **Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten**. Dari gambar tersebut, jumlah jembatan kabupaten sebanyak 488 buah jembatan atau sepanjang 3383,35 meter. Kondisi kemantapan jembatan kabupaten yang baik/sedang 392 buah jembatan atau sepanjang 2539,15 meter dan kondisi rusak 96 buah jembatan atau sepanjang 844,20 meter.



Gambar II. 4 Kondisi Jembatan Kabupaten

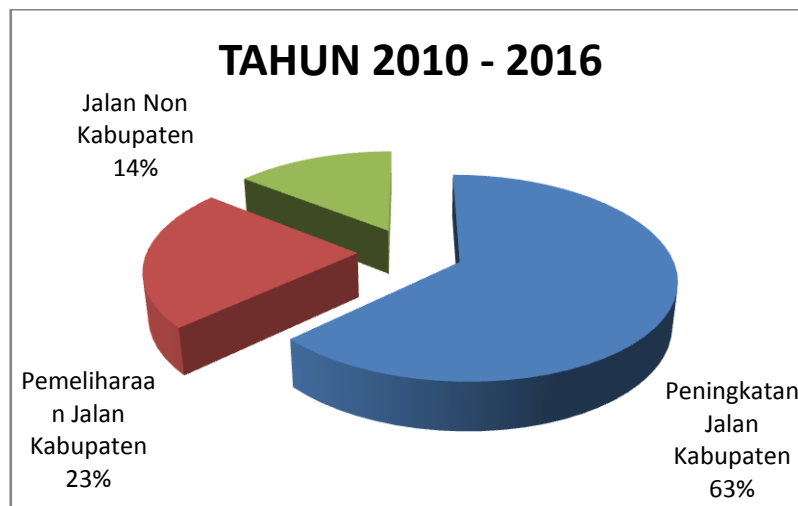
Kondisi perkembangan kemantapan jalan yang kurang signifikan tersebut dapat dimengerti karena alokasi dana untuk penanganan jalan kabupaten dari tahun 2006 sampai 2016 **selalu tidak memenuhi kebutuhan (terjadi backlog)**. Perkembangan alokasi

dana untuk penanganan jalan tersebut dapat dilihat pada **Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten.**



Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten

Apabila dikaitkan dengan terjadinya *backlog* tersebut, maka kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dinilai cukup, mengingat alokasi dana yang dibutuhkan untuk menangani jalan kabupaten selalu tidak memenuhi kebutuhan, sehingga kemantapan jalan kabupaten sulit untuk ditingkatkan secara signifikan seperti pada **Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten.**



Gambar II. 6 Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan

Selain menangani jalan kabupaten, Dinas Bina Marga juga menangani jalan desa. Perkembangan penanganan jalan desa dari tahun 2006 sampai 2016 mengalami

peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kinerja pelayanan kebinamargaan untuk penanganan jalan desa dapat dikatakan baik. Ini dapat dilihat pada **Tabel II. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa.**

Tabel II. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa

No	Tahun	Panjang (Km)	Biaya (Milyar Rupiah)
1	2006	12,850	2,650
2	2007	17,350	4,500
3	2008	125,26	22,600
4	2009	44,750	13,967
5	2010	87,920	22,026
6	2011	85,530	20,422
7	2012	98,792	20,005
8	2013	77,494	23,664
9	2014	59,920	23,038
10	2015	37,273	14,331
11	2016	55,540	18,642
Jumlah		627,149	171,154

Sumber: Subag. Program dan Perencanaan

Sejalan dengan adanya parameter baru yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 tahun 2010, maka Dinas Bina Marga sudah melakukan usaha penerapan SPM dan evaluasi pencapaian SPM sebagaimana terlihat pada **Tabel II. 4 Pencapaian SPM** berikut:

Tabel II. 4 Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Target Nasional		Capaian/Profil					
				Nilai	Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	
III	Penyediaan Jalan untuk melayani Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan jalan Kabupaten/Kotora	1	Persentase Tingkat Kondisi jalan Kabupaten/Kotora Baik dan sedang	60 %	2018	48,60	51,10			
			2	Persentase Terhunungnya Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kotora	100%	2018	96,00	96,00			

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum khususnya bidang Bina Marga belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Kendala utamanya adalah keterbatasan dana untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dalam SPM.

2.2.5 Kinerja Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium

Pelayanan perbengkelan dan alat berat dari tahun 2006 s/d 2016 mempunyai kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan dicapainya target PAD setiap tahun. Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan perbengkelan dan alat berat berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2006 s/d 2016.

Tabel II. 5 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2006	222.310.000,00	227.807.625,00	102,000
2007	298.991.000,00	305.903.465,00	102,310
2008	337.394.100,00	342.841.750,00	101,610
2009	404.386.000,00	409.349.500,00	101,230
2010	520.000.000,00	521.970.000,00	100,380
2011	565.000.000,00	568.697.000,00	100,654
2012	660.000.000,00	660.496.000,00	100,075
2013	745.000.000,00	745.568.000,00	101,001
2014	745.000.000,00	745.760.000,00	100,102
2015	765.000.000,00	765.580.000,00	100,076
2016	765.000.000,00	765.655.000,00	100,086

Sumber: Bidang Perbengkelan dan alat Berat

Selain pelayanan yang bersifat jasa, unit ini juga melayani kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan, seperti penanggulangan bencana alam. Kinerja pelayanan untuk kegiatan yang termasuk kategori ini dapat dinilai cukup baik, karena hampir semua permintaan bantuan dapat dilayani.

Laboratorium bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis penunjang Pelayanan laboratorium dan pengujian dari tahun 2007 s/d 2016 mempunyai

kinerja yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pelayanan laboratorium dan pengujian bahan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pada kegiatan perencanaan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, laboratorium ini juga melayani permintaan pihak lain.

Selain terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, Laboratorium ini pada tahun 2007 s/d 2016 juga diberi target dalam hal PAD. Apabila dilihat dari dicapainya target PAD setiap tahun, maka kinerja unit ini dapat dikategorikan baik. Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan laboratorium dan pengujian bahan berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2007 s/d 2016.

Tabel II. 6 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Pengujian Bahan) Tahun 2007 S/D 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2007	30.000.000,00	36.291.179,00	120,97
2008	33.000.000,00	71.677.792,00	217,21
2009	35.000.000,00	38.384.804,00	109,67
2010	80.000.000,00	89.473.520,00	111,84
2011	85.000.000,00	86.309.000,00	101,54
2012	140.000.000,00	145.200.000,00	103,714
2013	135.000.000,00	136.323.950,00	100,981
2014	135.000.000,00	135.139.000,00	100,333
2015	135.000.000,00	135.650.000,00	100,481
2016	135.000.000,00	135.543.000,00	100,402

Sumber: UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan

2.2.6 Kinerja Pelayanan Bidang Pengairan

Kinerja pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi dalam rangka meningkatkan ketersediaan air baku irigasi untuk kebutuhan pertanian, antara lain :

1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
2. Melaksanakan pengendalian daya rusak air;
3. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaa jaringan irigasi ;

4. Melaksanakan pengembangan kelembagaan petani pemakai air (P3A & GP3A) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air khususnya jaringan irigasi.
5. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kehandalan data dan informasi sumber daya air.

Capaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi selama periode RPJMD tahun 2010 – 2015 dengan melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum dengan 2 (dua) program wajib dan 15 sasaran kegiatan, yaitu :

1. Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dengan realisasi kegiatan :
 - a. Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA);
 - b. Penanggulangan Banjir dan Daya Rusak Air;
 - c. Pembangunan Embung;
 - d. Pengelolaan Sungai di Sekitar Ibukota Kabupaten.
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan realisasi kegiatan :
 - a. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Pembinaan GP3A/P3A Mitra Cai;
 - c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - d. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten;
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten;
 - f. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif – Program WISMP;
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pedesaan;
 - h. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan; dan
 - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Dari jumlah program kegiatan tersebut untuk alokasi anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.253.615.873.934,00 dengan realisasi keuangan sebesar 98% yaitu Rp. 252.094.178.690,00 sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk tahun anggaran 2016 mendapat alokasi anggaran Rp.73.599.902.583,00 dengan realisasi sampai dengan bulan maret sebesar 0,23% atau Rp. 168.484.100,00 dan capaian kinerja

fisik masih 0%, hal ini dikarenakan baru mulai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2.2.7 Kinerja Pelayanan Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis operasional. Kegiatan rutin UPTD diantaranya adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penataan bangunan lingkungan; jasa konstruksi dan pengendalian bangunan; penyehatan lingkungan; pengkajian bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang penataan bangunan lingkungan; jasa konstruksi dan pengendalian bangunan; penyehatan lingkungan; pengkoordinasian penyelenggaraan bangunan gedung di daerah; pengkajian bahan penerbitan izin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan izin usaha jasa konstruksi bangunan; pengkoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya; pengkoordinasian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; pengkoordinasian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; pengkoordinasian penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman; pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

2.2.8 Kinerja Pelayanan UPTD

UPTD bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis operasional. Kegiatan rutin UPTD diantaranya adalah memelihara jaringan jalan, jaringan irigasi dan bangunan penyehatan lingkungan serta memfasilitasi dinas lain, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat pada umumnya dalam kaitan tugas ke-PU-an di wilayahnya, serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan fisik dinas. Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, secara umum belum optimal. Hal ini dikarenakan diantaranya adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan kurang didukung dengan peralatan dan pendanaan yang memadai.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang juga dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian besar, yaitu kesekretariatan, bidang bina marga, bidang

pengairan, bidang Pe, bidang alat berat dan laboratorium, dan UPTD. Tantangan dan peluang pada masing masing kelompok adalah:

2.3.1 Tantangan dan Peluang pada Kesekretariatan.

Melihat kinerja pelayanan kesekretariatan dan kondisi yang ada, terdapat tantangan dan peluang yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Dibutuhkan hasil perencanaan dan pengendalian yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih tertib dan akuntabel.

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain

2.3.2 Tantangan dan Peluang pada Bidang Bina Marga.

Pada bidang kebinamargaan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Dibutuhkan hasil perencanaan dan pengendalian yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Jumlah penduduk semakin berkembang yang berakibat pada semakin meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara jalan dan menggunakan jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya.

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain

- Semakin tumbuhnya dunia usaha sehingga memungkinkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh pihak swasta atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- Adanya bantuan baik dari kementerian terkait maupun dari pemerintah provinsi.

2.3.3 Tantangan dan Peluang pada Bidang Pengairan

Pada bidang pengairan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan :

Seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk juga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari, konsekuensinya menuntut pengelolaan sumber daya air yang baik dalam pencapaian kebutuhan tersebut. Beberapa tantangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air terutama :

- Menurunnya ketersediaan air karena kondisi lingkungan yang semakin buruk; Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air yang dapat dijadikan andalan untuk sumber air baku;
- Meningkatnya kebutuhan air baku;
- Kebutuhan pengelolaan DAS terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air senantiasa dapat dipertahankan;
- Terjadinya perusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan, yang berakibat adanya banjir;
- Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah yang terkait dengan kejadian banjir.

b. Peluang :

Kabupaten Sukabumi mempunyai ketersediaan air yang cukup besar, namun tidak tersedia merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan).

Disisi lain beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan yang berakibat pada turunnya nilai kemanfaatan air sebagai konsekuensi penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.

Luas areal mencapai 67,316 ha areal sawah, dimana 7,416 ha areal sawah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari 2 Daerah Irigasi tersebar pada 2 Desa dan 2 Kecamatan; 10,427 ha areal sawah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari 9 Daerah Irigasi tersebar pada 12 Desa dan 6 Kecamatan; 49,473 ha areal sawah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 11 Daerah Irigasi Teknis luas areal 6.530 ha, 145 Daerah Irigasi Semi Teknis luas areal 21,601 ha, 254 Daerah irigasi Sederhana luas areal 14.155 ha 442 Daerah Irigasi Kecil 1.413 ha dan 168 Daerah Irigasi Tadah Hujan seluas 5.774 ha. Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan kabupaten rata – rata baru mencapai 35% atau baru mencapai 17,118 ha sehingga pada periode Renstra 2016 – 2021 menargetkan kondisi baik jaringan irigasi 69% atau sekitar 34.136 ha untuk mendukung program ketahanan pangan daerah.

Dengan potensi sumber daya air tersebut dalam mendayagunakan pengelolaan sumber daya air dapat mengembangkan dengan peningkatan pengusahaan sumber daya air dengan membuat kebijakan strategis sebagai berikut :

- b. mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk, kesejahteraan masyarakat;
- c. menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;
- d. meningkatkan peran sertaperseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan;

- e. menyusun peraturan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar;
- f. mempercepat penetapan alokasi air pada sumber air untuk perusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan; dan
- g. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan sumber daya air.

2.3.4 Tantangan dan Peluang pada Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan

Pada bidang Bangunan dan penyehatan Lingkungan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan :

- Timbulnya perbedaan kebijakan pendapat pada pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, dan teknik umum,
- Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat/publik terhadap pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, dan teknik umum.
- Berubah-ubahnya Peraturan/Ketentuan tentang sistem penganggaran.

b. Peluang :

- Adanya kewenangan daerah untuk merencanakan pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, teknik umum, kebersihan, pertamanan dan pemakaman,
- Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah maka desentralisasi pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, teknik umum, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman akan lebih optimal
- Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan baik dari segi penganggaran maupun pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, teknik umum, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman,
- Adanya sasaran perencanaan pengelolaan tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, teknik umum, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman yang sinergi dengan SKPD terkait

2.3.5 Tantangan dan Peluang pada Bidang Alat Berat dan Laboratorium

Pada bidang alat berat dan laboratorium, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Memenuhi target pendapatan asli daerah.
- Memenuhi permintaan pelayanan alat berat secara profesional.
- Memenuhi permintaan pengujian dengan cepat dan hasil yang akurat.

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya pihak swasta yang berinvestasi di Kabupaten Sukabumi dan membutuhkan pelayanan alat berat.
- Adanya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

2.3.6 Tantangan dan Peluang pada UPTD.

Pada UPTD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Dibeberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi mempunyai kondisi topografi yang berbukit dan bergunung serta kondisi tanah yang labil. Hal ini menjadikan beberapa kawasan menjadi daerah yang rawan bencana (longsor). Tantangan bagi UPTD adalah menjaga dan memelihara infrastruktur agar tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi, terutama jika terjadi bencana (longsor).

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain
- Adanya dukungan dari masyarakat dan perangkat pemerintah di wilayah.

Bab 3

ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan dalam Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang secara signifikan dapat mempengaruhi. Potensi sumber daya air yang harus dikelola melalui suatu sarana yang memadai baik dari segi pengaturan, institusi dengan sumber daya manusianya maupun dukungan biaya. Beberapa kekuatan pendorong dan penghambat dari dalam maupun pengaruh luar yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada saat ini secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi

Dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun kebelakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi, kondisi yang diharapkan, dan gambaran alternatif solusi dapat dilihat pada **Tabel III. 1 Identifikasi Permasalahan**. Dari tabel tersebut, kemudian dapat di temukanali permasalahan yang sifatnya strategis diantaranya adalah:

- a. **Kompetensi aparatur masih kurang.** Apabila dilihat dari jumlahnya, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum cukup banyak (bahkan berlebih untuk beberapa kasus), namun hal ini belum disertai dengan kompetensi yang memadai. Walaupun terdapat beberapa pegawai yang mempunyai latar belakang teknik, namun dari segi *skill* dan *attitude* masih kurang memadai. Hal ini menjadikan beban yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas, karena sebaik apapun alat dan teknologi yang dipergunakan dan sebanyak apapun dana dikucurkan, hasilnya akan jauh dari harapan apabila sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya kurang baik (tidak kompeten). Oleh karena itu, maka faktor SDM ini perlu mendapat perhatian

khusus dan serius agar tujuan dinas pada khususnya dan tujuan kabupaten pada umumnya, dapat dicapai.

- b. **Pendanaan yang belum memenuhi kebutuhan.** Pendanaan merupakan faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan infrastruktur. Kurangnya pendanaan ini merupakan kendala umum yang dihadapi dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Kekurangan pendanaan ini menjadi penyebab adanya *backlog*. *Backlog* ini terjadi setiap tahun dan tidak pernah terselesaikan, bahkan menjadi beban tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Kekurangan pendanaan ini diharapkan dapat diminimalisir pengaruhnya dengan melakukan perencanaan dan penyusunan program yang baik, yaitu dengan membuat pemeringkatan kegiatan (membuat prioritas program/kegiatan), sehingga kegiatan yang diusulkan benar-benar yang mempunyai manfaat besar dan berpengaruh luas pada masyarakat. Sayangnya hal inipun belum dapat dilakukan dengan baik karena banyaknya kepentingan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. **Manajemen infrastruktur tidak dapat dijalankan dengan semestinya.** Manajemen infrastruktur merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menangani infrastruktur dengan efektif dan efisien. Sesungguhnya, sistem manajemen infrastruktur akan sangat berguna ketika dana untuk penanganan infrastruktur terbatas. Artinya, dengan sistem ini, penanganan infrastruktur dapat dioptimalkan dengan membuat skala prioritas penanganan yang obyektif. Untuk penanganan jalan kabupaten, sebagai contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat sistem manajemen jalan kabupaten (*Kabupaten Roads management Systems, KRMS* dan *Brigde Management Systems, BMS*), namun sistem ini belum dapat berjalan sepenuhnya sehingga hasilnya pun belum dapat dirasakan secara maksimal oleh pengguna. Salah satu penyebabnya adalah tidak dapat berjalannya proses perencanaan dan penyusunan program sesuai dengan arahan KRMS sebagai akibat dari adanya berbagai kepentingan dari *stakeholders*. Selain itu, penyebab lain dari belum berjalannya sistem manajemen infrastruktur adalah masih terdapatnya kekurangmengertian dari *stakeholders* mengenai sistem manajemen infrastruktur, sehingga pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dilakukan secara *heuristic*.
- d. **Profesionalisme mitra kerja (kontraktor dan konsultan) masih kurang.** Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi ada mitra kerjanya,

yaitu kontraktor atau konsultan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas ke-PU-an. Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tugas ini, maka kualifikasi dan kualitas hasil kerja mitra kerja sangat berperan dan menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dinas. Untuk itu mutlak diperlukan mitra kerja yang profesional agar tugas dinas dapat tercapai sesuai target karena sebaik apapun aparat bekerja, apabila mitra kerjanya kurang baik (kurang profesional) maka bisa dipastikan hasil kerjanya pun akan menjadi kurang baik.

- e. **Perilaku pengguna (masyarakat) yang melanggar aturan.** Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mempunyai peran cukup penting dalam penyelenggaraan infrastruktur. Sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga, memelihara, dan menggunakan infrastruktur dengan baik dan sesuai aturan belum terbangun. Masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak peduli kepada penyelenggaraan infrastruktur, bahkan banyak yang melanggar aturan penggunaannya misalnya; membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan infrastruktur drainase menjadi kurang berfungsi, menggunakan kendaraan dengan muatan berlebih, membuat bangunan dengan tidak mengindahkan aturan seperti garis sempadan, memanfaatkan ruang milik jalan tidak sebagaimana mestinya seperti menggunakan bahu/trotoar untuk kios/berjualan dan lain-lain.

Tabel III. 1 Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

No	Tugas dan Fungsi	Permasalahan	Kondisi yang diharapkan	Alternatif Solusi
1	Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum			
2	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum			
3	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Di bidang kesekretariatan, bidang perencanaan teknis; Bina marga; pengairan; bangunan dan penyehatan Lingkungan; bidang alat berat dan laboratorium; Kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas			
4	Penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi			
5	Pengendalian dan pengawasan pasca penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa			

No	Tugas dan Fungsi	Permasalahan	Kondisi yang diharapkan	Alternatif Solusi
	konstruksi			
6	Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas			
7	Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas			
8	Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum			
9	Penerbitan rekomendasi untuk usulan penetapan status Jalan desa dari pemerintah desa kepada bupati			
10	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya			
11	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Tugasnya			
12	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tugas			
13	Pelaporan hasil pelaksanaan tugas			

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten maupun masyarakat.

Berdasarkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016–2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.

Dengan pencapaian kualitas perilaku tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dan *stakeholders* di Kabupaten Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga tercipta masyarakat yang religius dan mandiri. Perilaku tertinggi dan terhormat tersebut adalah sebagai pondasi utama pembangunan Kabupaten Sukabumi

Religius, merupakan proses yang bersifat religidimana keadaan yang memberikan nilai tambahsehingga pemerintah menjadi yang terdepan dalam memajukan masyarakat Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Mandiri, adalah kondisi masyarakat dimana keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016–2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada **Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi** berikut ini.



Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi

1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan **Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius** pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

2. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Mandiri

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan

yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Mandiri akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan *information sharing* agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan

kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang akan dijalankan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan insdutri yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusiayang berdaya saing dan religius
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan, untuk mencapai *Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri*, maka rumusan empat Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu:

Misi 1: MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI LOKAL MELALUI BIDANG AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INSDUTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, terdiri dari 5 (lima) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian
2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan bewawasan lingkungan

Misi 2: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN RELIGIUS, terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai – nilai keagamaan
2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional, terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
4. Membangun budaya partisipasi masyarakat

Misi 4: Optmalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah, terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan generasi sehat, kuat, cerdas dan produktif menyongsong bonus demografi 2020 – 2030
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

Dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas Bina Marga Menjalankan Misi yang ke 4 (empat) yaitu; **optmalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah** khususnya pada bidang Infrastruktur daerah. Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Bina Marga seperti pada **Tabel III. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Bina Marga** di bawah ini.

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Optmalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya tarik menarik kepentingan dan kurang fahamnya <i>stakeholders</i> dalam proses pengelolaan infrastruktur 2. Pendanaan untuk penanganan jalan yang sangat kurang, terjadi <i>backlog</i>. <i>Backlog</i> terjadi setiap tahun membuat <i>backlog</i> tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya 3. Umur jalan relatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih perlu disesuaikan dengan bidang kewenangan dalam rangka sinkronisasi tugas pokok dengan program dan kegiatan turunannya; 2. Masih lemahnya organisasi dan manajemen data 3. Masih lemahnya pelaksanaan monitoring/evaluasi dan pemanfaatan hasilnya; 4. Kurangnya sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program, terutama di bidang Pekerjaan Umum 2. Tingginya semangat dan orientasi pemerintah daerah pada pengembangan program pelayanan umum; 3. Kontinuitas

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pendek, jalan terbebani melebihi kapasitasnya 4. Kurangnya jumlah alat berat yang dimiliki dan sebagian alat berat sudah habis umur ekonomisnya 5. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM dan sarana prasarananya.	dibidang teknik lingkungan, dan teknik sipil 5. etersediaan sumber daya material yang kurang memadai 6. Belum maksimalnya hubungan koordinatif dengan SKPD terkait.	sosialisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta 4. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional 5. Tersedianya data base yang aktual dan faktual 6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.1.2 Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Ke lima agenda prioritas diatas, diturunkan kedalam 86 (delapan puluh enam) Program Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi Maju. Strategi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program-program pembangunan. Dari 86 program pembangunan tersebut, terdapat lima (5) Program Unggulan/Prioritas yang digulirkan. Dinamakan program unggulan/Prioritas karena program tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut, dari ke 5 (lima) program Unggulan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum termasuk dalam agenda yaitu :

A. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi menjadi Destinasi Wisata Dunia dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang Berwawasan lingkungan, ditempuh melalui 10 (sepuluh) kebijakan pembangunan yaitu :

1. *Memperbaiki intrastuktur jalan kabupaten dan membangun jalan strategis Kabupaten;*
2. *Mendorong percepatan pembangunan jalan Tol Ciawi – Sukabumi;*
3. *Mencetak lebih banyak lahan sawah baru dalam 5 tahun, memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air serta membangun jaringan irigasi;*
4. *Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2 kali lipat dari 2.917660 menjadi 6.000.000 wisatawan, 150.000 diantaranya wisatawan asing pada tahun 2020;*

5. Penataan destinasi wisata;
6. Mengatasi kemacetan di daerah perkotaan dalam 5 tahun, penataan sarana Transportasi Publik (Public Transport) dan penataan angkutan barang;
7. Membangun fasilitas publik berupa Ruanmg Terbuka Hiaju (RTH) di kawasan perkotaan dan fasilitas free hotsopt di kawasan Sukabumi Utara – Selatan;
8. Pelaksanaan Sukabumi Go Green;
9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tataruang dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati;
10. Meningkatkan anggaran desa untuk meningkatkan kemampuan desa dalam pembangunan sesuai kewenangan desa, yaitu :
 - a. Membangun dan memperbaiki Infrastruktur Desa (rehabilitasi serta pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi perdesaan);
 - b. Penyediaan Sarana Air Bersih;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan aparatur seda sampai dengan RW dan RT;
 - d. Memprioritaskan pembangunan desa – desa perbatasan antar Provinvi, dan antar Kabupaten/Kota.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Pada bagian ini akan dibahas mengenai renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi dinas, dan juga renstra provinsi Jawa Barat yang tinjauan dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi melayani masyarakat terutama dalam bidang kebinamargaan, bidang pengairan, bidang bangunan dan penyehatan lingkungan oleh karena itu renstra kementerian yang ditinjau adalah renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya renstra Direktorat Jenderal Jenderal Bina Marga. Renstra lain yang ditinjau adalah renstra Provinsi Jawa Barat dengan renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai pendukungnya.

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015 –2019

A. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010–2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015–2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong* guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja,

amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

B. Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan* yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
 - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Tujuan 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
 - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
 - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas
 - c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

C. Program dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
- b. Pembinaan Penatagunaan SDA
- c. Pembinaan Program dan Anggaran
- d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
- g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

- i. Dukungan Manajemen DSDAN
- j. Pembinaan Keamanan Bendungan
- k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
- l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- n. Membangun dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
- o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
- p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
- c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
- d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
- e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
- f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
- g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan Kota Besar dan Bebas Hambatan
- h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
- b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
- c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
- d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
- f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
- g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan

- 4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
 - d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
- 5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta
 - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
 - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
 - e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
 - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBP)
 - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)
- 6. Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
 - b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
 - d. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
 - e. Penyediaan Rumah Susun
- 7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**, meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis.
 - d. Pengembangan Perkotaan.
 - e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. Program Generik, merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
- d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN Perumahan Rakyat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ;
- b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;
- c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan
- c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
- d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II
- d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
- e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen
- b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga

A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

Program penyelenggaraan jalan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“TERWUJUDNYA SISTEM JARINGAN JALAN YANG ANDAL, TERPADU & BERKELANJUTAN DI SELURUH WILAYAH NASIONAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ”

Makna dari visi tersebut adalah: Direktorat Jenderal Bina Marga mampu menyediakan jaringan jalan yang yang andal, terpadu & berkelanjutan serta mampu mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya Indonesia yang Aman, Adil dan Demokratis serta Lebih Sejahtera melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengusahaan dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi program penyelenggaraan jalan, maka Misi Direktorat Jenderal Bina Marga yang ditetapkan untuk periode tahun 2015 –2019 adalah:

1. Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.
2. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional.
3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai.

B. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Marga dan untuk mencapai tujuan Kementerian Pekerjaan Umum selama periode lima tahun ke depan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan serta mendukung RAN-MAPI (Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim).
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
3. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan.
4. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
5. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara lebih efisien dan efektif.

Adapun sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS
 - a. Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 94%.

- b. Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55 milyar kendaraan kilometer per tahun .
- c. Meningkatnya fasilitasi pembinaan pelaksanaan teknis penyelenggaraan jalan daerah menjadi sebesar 70 %.

2. SASARAN RINCI

Adapun sasaran rinci berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Bina Marga yang akan dicapai meliputi:

Tujuan 1 : Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim), dengan sasaran Tercapaiannya prosentase penyelenggaraan jalan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar 100 %.

Tujuan 2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dengan sasaran:

- a. Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional sebesar 91,55 milyar kendaraan per tahun.
- b. Penurunan waktu tempuh rata-rata antar-Pusat Kegiatan Nasional sebesar 5%.
- c. Prosentase jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap sebesar 94 %.
- d. Panjang Penambahan lajur kilometer pada ruas jalan nasional sebesar 13.000 lajur km.
- e. Panjang peningkatan kapasitas jalan sebesar 19.370 km.
- f. Panjang peningkatan kapasitas jalan nasional dengan spesifikasi jalan raya sebesar 400 km.
- g. Prosentase penyelesaian lebar jalan pada 4 (empat) Lintas Utama menjadi minimum lebar 7 m pada Lintas Timur Sumatera dan Lintas Pantura, dan 6 m pada Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi sebesar 100%.
- h. Prosentase pengurangan panjang jalan nasional sub-standar sebesar 10 %.
- i. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan di 150 lokasi.

- Tujuan 3 : Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan dengan sasaran:
- a. Panjang penambahan jaringan jalan bebas hambatan sebesar 700 km.
 - b. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan dalam mendukung kerjasama ekonomi sub regional ASEAN sebesar 75 %.
- Tujuan 4 : Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana dengan sasaran:
- a. Terselenggaranya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan dikawasan strategis (kawasan perbatasan, pulau terluar/terdepan) dan wilayah tertinggal sepanjang 1.378 km.
 - b. Prosentase berfungsinya kembali ruas-ruas jalan yang terkenda dampak pasca bencana sebesar 100 %.
- Tujuan 5 : Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien dengan sasaran :
- a. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi bidang jalan dan jembatan sebesar 100 %.
 - b. Prosentase fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menjadi sebesar 70%.

C. Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi yang ditetapkan untuk Program Penyelenggaraan Jalan, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan diidentifikasi berdasarkan kewenangan masing-masing unit kerja terhadap tugas-tugas Direktorat Jenderal Bina Marga yang tertuang dalam Undang – Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan matriks kewenangan masing-masing unit kerja terhadap tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang, maka Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

1. Koordinasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Jalan
2. Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan
3. Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan
4. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan bebas Hambatan dan Perkotaan
5. Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Barat

6. Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Timur
7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Rincian Sub Kegiatan dan Outputnya dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Manajemen Jalan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
 - a. Penanganan tanggap darurat
 - b. Reformasi Birokrasi
 - c. Pemenuhan SDM satker dari PNS Pusat
 - d. Legalisasi NSPK dan SOP
 - e. Inventarisasi dan revaluasi BMN
 - f. Pembinaan kelembagaan, administrasi dan keuangan
 - g. Penyiapan pembentukan Unit Sistem Manajemen Mutu
 - h. Pemenuhan Penilik jalan
- 2. Kegiatan: Perencanaan Pemograman Dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Program dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan
 - b. Pengembangan sistem informasi dan manajemen jalan,
 - c. Penyediaan data dan informasi penyelenggaraan jalan
 - d. Penyusunan program & anggaran penyelenggaraan jalan
 - e. Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah,
- 3. Kegiatan: Pembinaan Teknik Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Teknik dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
 - a. Penyusunan Konsep NSPM Teknik Jalan dan Jembatan
 - b. Penyusunan dokumen lingkungan
 - c. Dukungan Perencanaan Teknik
 - d. Identifikasi penanganan lokasi rawan kecelakaan (defisiensi jalan) dan rawan bencana
 - e. Dukungan Bahan dan Perlatan
- 4. Kegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Serta Fasilitas Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja

Direktorat Jalan bebas Hambatan dan Jalan Kota dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Perencanaan dan Pembinaan jalan & Jembatan Perkotaan
 - b. Pembangunan Jalan bebas Hambatan (baik oleh pemerintah atau swasta)
 - c. Perencanaan dan Pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan
 - d. Pengadaan Lahan
- 5. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Jalan & Jembatan Wilayah Barat.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Jalan & Jembatan Wilayah Barat dengan Sub- Kegiatan Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Barat
- 6. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:
- a. Perencanaan Teknik dan Pengawasan
 - b. Preservasi Jalan dan Jembatan
 - c. Peningkatan Kapasitas jalan
 - d. Penerapan teknologi praktis dan pengendalian mutu dan keselamatan konstruksi,
 - e. Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan,
 - f. Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis dan Wilayah Tertinggal,

3.3.3 Renstra Direktorat Jendral Pengendalian Sumber Daya Air

Kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Jawa Barat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi acuan bagi semua organisasi perangkat daerah termasuk Dinas PSDA Kabupaten Sukabumi.

Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan. Pemerintah Pusat memandang, bahwa Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air masih belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dikembangkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan reformasi kebijakan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta

berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Pembaharuan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui perumusan kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya air. Pembangunan Sumber Daya Air (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-14/M.EKON/12/2001) terlihat jelas penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembaruan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dengan demikian visinya adalah :

“Terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan rakyat”.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu Pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian serta perluasan kesempatan kerja di pedesaan. Hal itu selaras dengan tujuan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dalam mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006).

Sehingga dalam renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi sama-sama mengusung sasaran untuk tercapainya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari; tercapainya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; peningkatan dan pengembangan kelembagaan pemakai air; peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi; pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; peningkatan pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna dan pemanfaat sumber daya air dengan meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya air.

3.3.4 Renstra Direktorat Jendral Bina Konstruksi

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

A. Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah :

“Keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia”

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Misi Direktorat Jendral Bina Konstruksi yang ditetapkan adalah :

1. Mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi Indonesia,
2. Mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi Indonesia,
3. Menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang

3.3.5 Renstra Direktorat Jendral Perumahan dan Tata Bangunan

A. Visi dan Misi

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi ini, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditetapkan untuk periode tahun 2015 –2019 adalah:

- Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
- Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.

- Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
- Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
- Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.
- Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bertolak dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi, dimana kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah lebih diarahkan kepada sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah.

3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

A. Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

1. Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di wilayah Jawa Barat, visi Dinas Bina Marga disusun secara selaras vertikal maupun horisontal. Dengan dasar pemikiran tersebut Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut:

“TERCAPAINYA PRASARANA JALAN YANG MANTAP UNTUK Mendukung Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera”

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam arti penekanan kepada setiap SDM yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepadanya, efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Profesionalisme perlu selalu ditingkatkan dan dijaga. Untuk itu diperlu-kan sumber daya manusia yang berpendidikan, ahli, bermoral, bermental kuat dan

bertanggung jawab untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten untuk kepentingan dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam sudut Agama Islam, profesional dapat dilihat dalam cuplikan ayat berikut "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan barisan yang kokoh, bagaikan sebuah bangunan yang terkonstruksi dengan rapi."(As-Shaf: 4). Dalam penerapan maupun penyerapannya pekerjaan yang dilakukan secara profesional artinya "pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan keahliannya dan dikerjakan secara sungguh-sungguh (itqan) dan rapi (ihsan)" (HRThayalisi).

Prasarana Jalan adalah jalan sebagai prasarana transportasi jalan raya yang meliputi jalan dan jembatan serta ruang pengawasan jalan. Prasarana jalan diharapkan dalam kondisi yang mantap yang berarti suatu kondisi jalan yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan pada pengguna dengan kriteria teknis tertentu.

Pengertian dari mandiri, dinamis, dan sejahtera sesuai dengan visi Gubernur Jawa Barat yang merupakan tujuan dari pelaksanaan tugas dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Untuk mencapai visi yang merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, diperlukan rumusan misi sehingga diperoleh panduan tentang apa yang harus dilaksanakan. Dengan latar belakang ini misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional.
2. Mewujudkan Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkesinambungan
3. Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana
4. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan Jalan
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pemanfaatan Jalan

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilannya perlu ditetapkan tujuan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1: **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional**

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terciptanya aparat Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat yang agamis, dan professional dengan sasaran:

1. Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Bina Marga agar pekerjaan dapat dilakukan dengan bermutu, efektif dan efisien.

Misi 2: **Mewujudkan Perencanaan Jalan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkesinambungan**

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkesinambungan dengan sasaran terwujudnya rencana penanganan jalan yang efektif dan efisien.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah terwujudnya hasil penanganan jalan yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dengan sasaran tersedianya perencanaan teknis penanganan jalan yang sesuai dengan aspek teknis dan lingkungan.

Misi 3: **Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana**

Tujuan yang akan dicapai adalah terpertahkannya kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang direncanakan dengan sasaran terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh jalan provinsi.

Misi 4: **Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan**

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terciptanya jaringan jalan yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik dengan sasaran terselenggaranya peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah terciptanya aksesibilitas yang tinggi yang mampu menghubungkan dua atau lebih simpul jalan/kota dengan sasaran terselenggaranya pembangunan jalan dan jembatan.

Misi 5: **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pemanfaatan Jalan**

Tujuan yang akan dicapai adalah pemanfaatan pada ruang pengawasan jalan (Ruwasja) sesuai dengan perUndang – Undangan yang berlaku dengan sasaran meningkatnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan sesuai dengan perUndang – Undangan yang berlaku.

3. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Program dan kegiatan Dinas Bina Marga disusun dengan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Barat yang telah disampaikan dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2014–2018. Rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:
 - Pembangunan Jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Peningkatan Jalan
 - Penggantian Jembatan
 - Pembebasan Lahan
 - Perencanaan pembangunan jalan.
 - Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:
 - Rehabilitasi Jalan
 - Rehabilitasi Jembatan
 - Pemeliharaan jalan
 - Pemeliharaan Jembatan
 - Perbaikan badan jalan
 - Pekerjaan drainase
3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
 - Sistem Manajemen Jaringan Jalan (*Inter Urban Road Management Systems/IRMS*)
 - Sistem Manajemen jembatan (*Bridge Management Systems / BMS*)
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan:
 - Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija)
 - Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang.
 - Pengawasan pemanfaatan jalan dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan:
 - Pengadaan peralatan untuk pemeliharaan jalan
 - Pembangunan gedung workshop
 - Pengadaan peralatan untuk pengujian mutu jalan.
6. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
 - Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:

- Peningkatan kemampuan aparatur
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan administrasi perkantoran
 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
 - Pengadaan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
 10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
 11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:
 - Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 12. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan:
 - Peningkatan Pengelolaan dan Perlengkapan Kearsipan.

4. Indikator Sasaran

Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian visi, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator ini direpresentasikan dalam kondisi jalan mantap dan tidak mantap. Pengertian tingkat pelayanan ruas jalan mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sedangkan pengertian ruas jalan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan yang dalam kenyataannya sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Berdasarkan kriteria kondisi jalan di atas, tingkat kemantapan kondisi jalan provinsi di Jawa Barat pada Desember 2008 sebesar 88,16% dengan rincian kondisi baik 34,92%, kondisi sedang 53,24%, dan kondisi rusak ringan serta rusak berat 11,84%. Berdasarkan hal tersebut ditargetkan kemantapan jalan pada akhir tahun 2013 yaitu 93 – 94% dengan Target Midterm sebesar 91 – 92%. Rencana indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 4 Indikator Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan kinerja jaringan	Meningkatnya kemampuan	Tingkat kemantapan					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4					
	jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan	struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat	Jalan	97.40	97.50	97.60	97.70	97.80
	Terciptanya pemanfaatan dan pengguna bagian-bagian jalan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan	Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku	Tingkat pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja sesuai dengan aturan yang berlaku	97.00	98.80	100	100	100

Sumber: Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

B. Renstra Dinas Pengairan Provinsi Jawa Barat

1. Visi dan Misi Dinas Pengairan Provinsi Jawa Barat

Visi

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat dan selaras dengan visi Kementerian PU, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu :

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN

Adapun sebagai penjelasan termaksud dari “ Visi”tersebut adalah sebagai berikut :

Infrastruktur : diartikan Prasarana bidang sumberdaya air yang dikelola oleh Dinas PSDA *Sumber daya air dan Irigasi* : diartikan aktivitas Dinas PSDA yaitu mengelola sumberdaya air dan irigasi sebagai obyeknya.

Andal :diartikan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aparatur yang memadai memiliki kemampuan yang ada mampu melakukan pengelolaan sumberdaya air

Berkelanjutan :diartikan pengelolaan sumberdaya air berkesinambungan dan terus menerus dari tahun ke tahun mulai dari RPJMD ke RPJP selanjutnya karena air sebagai kebutuhan hidup yang vital dan esensial.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan dan selaras.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Misi Provinsi Jawa Barat, yaitu :

Misi 1 : Mengembangkan kebijakan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Misi 2 : Meningkatkan Kapasitas Sumber daya manusia dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air

Misi 3 : Meningkatkan upaya konservasi, Pendayagunaan dan pengendaliandaya rusak air

Misi 4 : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan irigasi.

Misi 5 :Meningkatkan Ketersediaan serta kualitas data dan sistem informasiSumberdaya air

C. Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

1. Visi dan Misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN, DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang dalam rencana program & anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan keterpaduan multisektor.

2. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan
3. Perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi legalitas hukum.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.
5. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan bantuan teknis, pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Bidang Bina Marga

Berbicara ruang berarti berbicara mengenai lingkungan hidup. Melaksanakan penataan ruang berarti melakukan tindakan pengelolaan lingkungan hidup dimana seluruh asas-asas penataan ruang harus dijalankan. Pola penataan ruang memiliki hubungan langsung dengan persoalan lingkungan global. Pertumbuhan kota, pembukaan lahan pertanian dan konservasi hutan telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengkhawatirkan. Penataan ruang harus terfokus pada penciptaan kehidupan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengembangan wilayah dan penataan ruang meliputi diantaranya menyeimbangkan keberadaan kawasan budidaya dan kawasan lindung tanpa menimbulkan kesenjangan antar wilayah sampai intervensi gaya hidup penduduk dengan menciptakan tata ruang yang minim penggunaan energi dan dampak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keharmonisan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu harus ada pola perencanaan tata ruang kearah yang lebih berwawasan lingkungan.

Sistem perencanaan tata ruang harus bisa menjawab tantangan kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kompleks tanpa melupakan tugasnya untuk selalu berpihak pada kaum miskin (*pro poor*), mendukung pembangunan (*pro growth*), namun mampu menciptakan keberlanjutan (*prosustainability*). Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), **'Strategic Environmental Assessment'** diharapkan dapat membantu melengkapi proses berpikir perencanaan tata ruang saat mempertimbangkan aspek

lingkungan, sekaligus menjawab munculnya kebutuhan dengan analisis mendalam mengenai dampak dan konsekuensi lingkungan.

Berdasarkan paparan diatas maka untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mensinkronkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten dan kota. Adanya kebijakan di tingkat Provinsi diharapkan akan terjadi integrasi arah pembangunan antar kota dan kabupaten dalam kapasitas dan peranannya masing-masing.

Pengembangan struktur ruang Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan membagi wilayah Jawa Barat menjadi 3 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu Wilayah Pengembangan Barat, Wilayah Pengembangan Tengah dan Wilayah Pengembangan Timur. Masing-masing wilayah pengembangan tersebut terdiri dari wilayah utama dan wilayah penunjang.

Kebijakan struktur ruang Jawa Barat 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaturan sistem kota-kota di wilayah utara dan tengah serta mengembangkan secara terbatas sistem kota-kota di wilayah selatan. Pengaturan sistem kota-kota sebagai perwujudan dari struktur tata ruang di wilayah Jawa Barat dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pertumbuhan utama yang jangkauan pelayanannya mencakup skala pelayanan nasional, yaitu Metropolitan Bodebek, Bandung, dan Cirebon. Pengembangan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi Bodebek, Bandung dan Cirebon, yang didukung oleh 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi: Pelabuhanratu, Cikampek, Cianjur, Tasikmalaya, Kadipaten dan Pangandaran.
- (2) Pengembangan kawasan andalan dilakukan melalui pengembangan 6 kegiatan utama yaitu agribisnis, industri, pariwisata, jasa, bisnis kelautan, dan sumber daya alam di 8 (delapan) kawasan andalan. Kawasan andalan di wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
 - a. Kawasan Andalan Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dengan kegiatan utama industri, pariwisata, jasa, dan sumberdaya manusia;

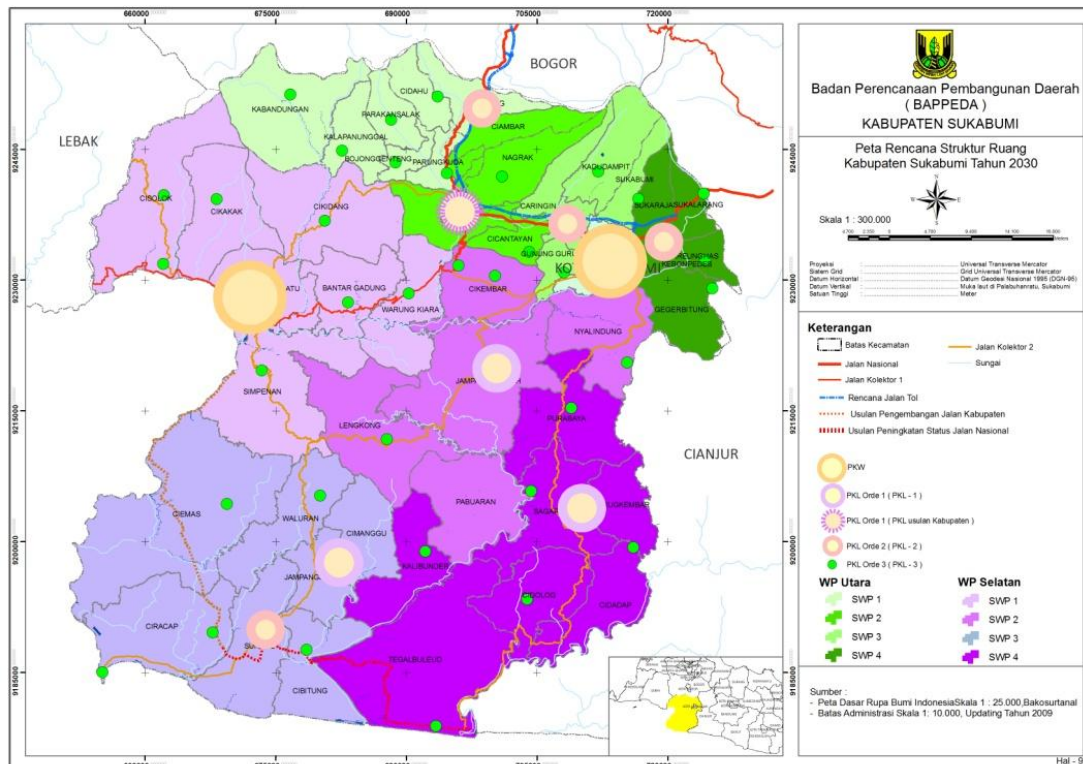
- b. Kawasan Andalan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) dengan kegiatan utama agribisnis dan pariwisata;
 - c. Kawasan Andalan Sukabumi dan sekitarnya dengan kegiatan utama agribisnis, pariwisata, dan bisnis kelautan;
 - d. Kawasan Andalan Priangan Timur dan sekitarnya (Priatim dsk.) dengan kegiatan utama agribisnis, bisnis kelautan, dan pariwisata;
 - e. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan sumberdaya manusia, jasa, agribisnis, pariwisata, dan industri;
 - f. Kawasan Andalan Pangandaran dan sekitarnya dengan kegiatan utama pariwisata dan bisnis kelautan;
 - g. Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning) dengan kegiatan utama agribisnis, jasa, pariwisata, industri, sumberdaya manusia, dan bisnis kelautan;
 - h. Kawasan Andalan Purwakarta Subang Karawang (Purwasuka) dengan kegiatan utama industri, agribisnis, pariwisata, dan bisnis kelautan.
- (3) Pengembangan kawasan pertahanan keamanan
- (4) Pengembangan infrastruktur wilayah difokuskan pada wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya, yaitu pada wilayah bagian utara dan tengah.

Kebijakan pengembangan infrastruktur untuk **wilayah bagian selatan Jawa Barat sangat dibatasi** mengingat perkembangan wilayah ini perlu dikendalikan **karena sebagian besar fungsi pemanfaatan ruangnya bersifat lindung**. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur wilayah ini akan diprioritaskan pada pembentukan struktur tata ruang yang lebih terintegrasi agar peran pusat pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Hal ini karena salah satu kendala tidak terbentuknya struktur tata ruang pada masa lalu adalah faktor tidak terintegrasinya sistem jaringan infrastruktur yang menghubungkan antara fungsi pusat pertumbuhan utama dengan daerah *hinterland*-nya.

Seperti telah digambarkan diatas, Sukabumi merupakan kawasan andalan untuk pengembangan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan. Selain itu, Palabuhanratu merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat. Dengan demikian, Kabupaten Sukabumi mempunyai peran yang cukup strategis bagi pengembangan wilayah di Jawa Barat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi sudah dibuat sebagai arahan pengembangan Kabupaten Sukabumi dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat agar pengembangannya sinergis dengan pengembangan wilayah lain sesuai dengan

arahan RTRW Provinsi Jawa Barat. Adapun Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada **Gambar III. 2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi**.



Gambar III. 2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi

Pada rencana struktur ruang, Kabupaten Sukabumi dibagi menjadi 2 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

A. WP Utara, yaitu Kabupaten Sukabumi (bagian utara) yang meliputi 21 kecamatan dengan arahan penggunaan ruang sebagai wilayah pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan pendidikan dan kesehatan, industri **non polutif dan tidak mengganggu resapan air**, perdagangan, dan jasa. WP Utara dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu:

1. SWP 1 Cicurug, yang terdiri dari Kecamatan Cicurug, Parungkuda, Bojonggenteng, Parakansalak, Kalapanunggal, dan Kabandungan.
2. SWP 2 Cibadak, yang terdiri dari Kecamatan Cibadak, Ciambar, Nagrak, dan Cicantayan.
3. SWP 3 Cisaat, yang terdiri dari Kecamatan Cisaat, Caringin, Kadudampit, Sukabumi, dan Gunungguruh
4. SWP 4 Sukaraja, yang terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Sukalarang, Kebonpedes, Cireunghas, dan Gegerbitung.

B. WP Selatan yaitu Kabupaten Sukabumi (induk) yang meliputi 26 Kecamatan dengan arahan penggunaan ruang sebagai wilayah pengembangan agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri **non-polutif**, perdagangan/jasa WP Selatan dibagi menjadi 4 SWP yaitu:

1. SWP 1 Palabuhanratu, yang terdiri dari Kecamatan Palabuhanratu, Cisolak, Cikakak, Cikidang, Simpenan, Bantargadung, dan Warungkiara. Khusus untuk Kecamatan Palabuhanratu yang ditetapkan sebagai PKNp, diarahkan juga untuk bisnis kelautan skala nasional dan internasional;
2. SWP 2 Jampangtengah, yang terdiri dari Kecamatan Jampangtengah, Cikembar, Lengkon, Pabuaran dan Nyalindung
3. SWP 3 Jampangkulon, yang terdiri dari Kecamatan jampangkulon, Ciemas, Waluran, Ciracap, Cimanggu, Surade, dan Cibitung
4. SWP 4 Sagaranten, yang terdiri dari Kecamatan Sagaranten, Purabaya, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Kalibunder, dan Tegalbuleud.

Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel III. 4 Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten dan**

Gambar III. 3 Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Sukabumi

Tabel III. 4 Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten

WP	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
WP Utara (21 kecamatan, pusat WP di Kota Cibadak)	Mendorong perkembangan koridor Sukabumi-Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi fasilitas PKL • Mengembangkan infrastruktur wilayah • Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL di WP Utara dan simpul layanan wilayah sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian • perkebunan, • perikanan darat, • pariwisata, • industri pengolahan dan rumahan
	SWP 1 Cicurug (7 kec)	<ul style="list-style-type: none"> • Terutama melengkapi 	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan untuk pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian • perikanan

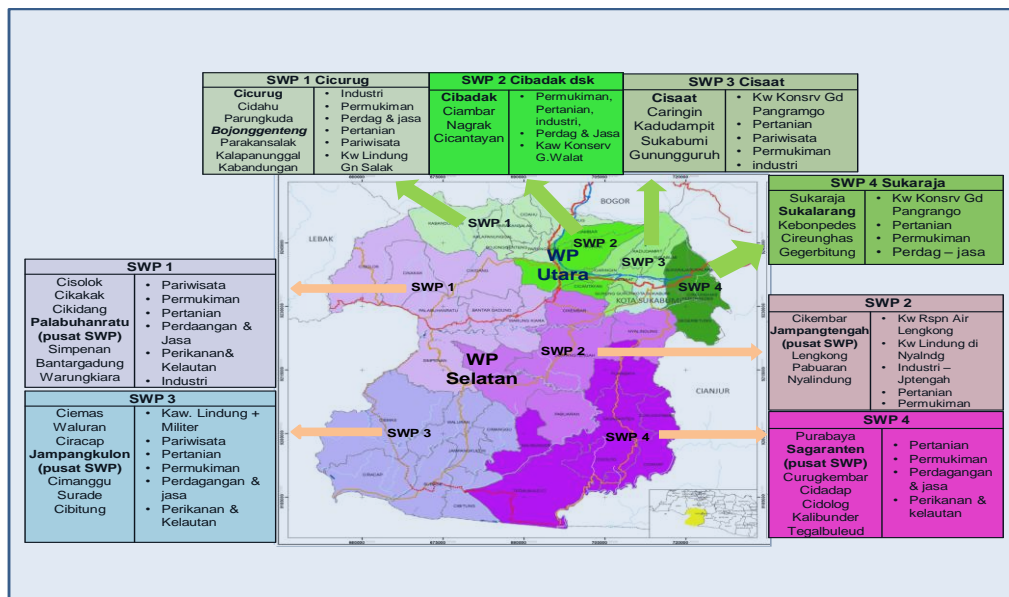
WP	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong perkotaan Cicurug sebagai PKL-2 dan koridor Cicurug – Parungkuda Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan 	fasilitas PKL-2 Cicurug <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan infrastruktur wilayah Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, pariwisata, layanan kesehatan dan pendidikan 	agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-2 Cicurug dan simpul layanan wilayah sekitarnya;	darat, <ul style="list-style-type: none"> pariwisata industri pengolahan
	SWP 2 Cibadak (4 kec) <ul style="list-style-type: none"> Mendorong Perkotaan Cibadak sbg PKL-1 & pusat pemerintahan DOB Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Terutama melengkapi fasilitas PKL-1 Cibadak Mengembangkan infrastruktur wilayah Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, pariwisata, layanan kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-1 Cibadak dan simpul layanan wilayah sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> pertanian perkebunan perikanan darat, pariwisata industri pengolahan
	SWP 3 Cisaat (5 kec) <ul style="list-style-type: none"> Mendorong perkotaan Cisaat sbg PKL-2 dan sinergis dgn pemb. Kota Sukabumi Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Terutama melengkapi fasilitas PKL-2 Cisaat Mengembangkan infrastruktur wilayah Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, pariwisata, layanan kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-2 Cisaat dan simpul layanan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> pertanian perikanan darat, pariwisata industri pengolahan

WP	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			sekitarnya;	
	SWP 4 Sukaraja (5 kec) <ul style="list-style-type: none"> Mendorong perkotaan Sukaraja sbg PKL-2, dan mengendalikan perkembangan koridor Sukaraja-Sukalarang, shg sinergis dgn pembangunan Kota Sukabumi dan perbatasan Cianjur 	<ul style="list-style-type: none"> Terutama melengkapi fasilitas PKL-2 Sukaraja Mengembangkan infrastruktur wilayah Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, pariwisata, layanan kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-2 Sukaraja dan simpul layanan wilayah sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> pertanian perkebunan perikanan darat, pariwisata, industri pengolahan
WP Selatan (21 kecamatan, pusat WP di Kota Palabuhanratu)	Mendorong perkembangan PKNp Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi fasilitas pendukung PKW & PKL Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global 	<ul style="list-style-type: none"> diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya; Palabuhanratu ditetapkan sbg PKNp, dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk bisnis kelautan skala nasional dan internasional; 	<ul style="list-style-type: none"> pertanian perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan
	SWP 1 Palabuhanratu (7 kec) <ul style="list-style-type: none"> Mendorong 	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi fasilitas pendukung PKW Mengembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan 	<ul style="list-style-type: none"> pertanian perkebunan, perikanan

WP	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	<p>perkembangan Palabuhanratu sbg PKW dan PKNp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan 	<p>infrastruktur strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan 	<p>kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKW Palabuhanratu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palabuhanratu ditetapkan sbg PKNp, dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional; 	<p>tangkap,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pariwisata , • industri pengolahan, • bisnis kelautan
	<p>SWP 2 Jampangtengah (5 kec)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perkembangan perkotaan Jampangtengah sbg PKL-1 & pusat SWP 2 • Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi fasilitas PKL-1 Jampangtengah • Mengembangkan infrastruktur wilayah • Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, dan perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKL-1 Jampangtengah 	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian • perkebunan, • pariwisata , • industri pengolahan hasil pertanian
	<p>SWP 3 Jampangkulon (7 kec)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perkembangan perkotaan Jampangkulon sbg PKL-1 & pusat SWP 3 • Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi fasilitas PKL-1 Jampangkulon • Mengembangkan infrastruktur wilayah • Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, dan perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKL-1 Jampangkulon 	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian • perkebunan, • perikanan tangkap • bisnis kelautan • pariwisata , • industri pengolahan hasil pertanian

WP	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	keseimbangan ekologi lingkungan	pendidikan		
	SWP 4 Sagaranten (7 kec) <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perkembangan perkotaan Sagaranten sebagai PKL-1 & pusat SWP 4 • Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi fasilitas PKL-1 Sagaranten • Mengembangkan infrastruktur wilayah • Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, dan perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKL-1 Sagaranten 	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian • perkebunan, • perikanan tangkap • pariwisata, • industri pengolahan hasil pertanian

Pengembangan infrastruktur mengikuti rencana arahan pengembangan ruang Kabupaten Sukabumi. Arahan pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi, secara tidak langsung sudah memperhatikan KLHS, diantaranya adalah dengan memperhatikan/mempersyaratkan bahwa **pengembangan yang akan dilakukan tidak mengganggu resapan air**. Selain itu, industri yang diperkenankan adalah **industri non polutif**. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijaksanaan pengembangan infrastruktur untuk wilayah disebelah utara jalan nasional Bogor-Sukabumi akan dibatasi mengingat perkembangan wilayah ini perlu dikendalikan karena sebagian besar fungsi pemanfaatan ruangnya bersifat kawasan lindung. Oleh karena itu **penggunaan ruang di wilayah utara perlu diatur**. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus dikaji dampaknya (dilakukan analisis dampak lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan) sebagai salah satu syaratnya sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Hal tersebut juga dilakukan untuk wilayah selatan, karena wilayah ini termasuk kedalam wilayah selatan Jawa Barat yang dalam arahan kebijakannya adalah merupakan kawasan lindung. Oleh karena itu **penggunaan ruang di wilayah selatan perlu diarahkan**.



Gambar III. 3 Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Sukabumi

3.4.2 Bidang Pengairan

Bertolak dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi, dimana kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah lebih diarahkan kepada sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah, diantaranya sarana dan prasarana jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya yang saat ini mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, melihat pada persoalan yang dihadapi tersebut di atas maka kebijakan Dinas PSDA Kabupaten Sukabumi yang ditempuh pada periode pembangunan 2016 - 2021 adalah terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya air yang dapat meningkatkan cakupan pelayanan irigasi dan meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan irigasi melalui kebijakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan memperhatikan rencana tataruang daerah yang telah ditetapkan.

Penanganan hulu diarahkan kepada pemeliharaan sumber daya air dengan pengendalian daya rusak air dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar sumber air, sehingga keterjaminan air baku dan air sungai dapat sampai ke areal sawah dan pertanian.

Untuk mencapai sasaran tersebut ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi, yaitu :

- a) Peluang

Adanya peraturan perundangan atau peraturan daerah yang mengatur :

- Penyusunan data potensi dan pemanfaatan air dan sumber daya air;
- garis sempadan sungai dan sumber air lainnya;
- Penyusunan bahan penetapan serta pengawasan baku mutu dan peruntukan sungai dan sumber air lainnya;
- Koordinasi dalam penilaian amdal sumber daya air;
- Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air.

b) *Ancaman*

- Kurangnya sumber daya manusia dan personil bidang teknik pengairan/ sumber daya air;
- Kurangnya koordinasi antar sektor;
- Tidak maksimalnya fungsi dan peran serta wadah kelembagaan seperti Dewan Air atau Komisi Irigasi tingkat Kabupaten;
- Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

3.4.3 Bidang Bangunan dan penyehatan Lingkungan

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan, beberapa yang perlu diperhatikan dari RTRW Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) yang didasari sudutkepentingan:

- 1) Pertahanan keamanan
- 2) Ekonomi
- 3) Lingkungan hidup
- 4) Sosial budaya
- 5) Pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi

b. Arahan pengembangan pola ruang dan struktur ruang yang mencakup:

- 1) Arahan pengembangan pola ruang:
 - Arahan pengembangan kawasan lindung dan budidaya
 - Arahan pengembangan pola ruang terkait bidang Cipta Karya seperti pengembangan RTH.

- 2) Arahan pengembangan struktur ruang terkait keciptakaryaannya seperti pengembangan prasarana sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, RTH, Rusunawa, maupun Agropolitan.
- c. Ketentuan zonasi bagi pembangunan prasarana sarana bidang Cipta Karya yang harus diperhatikan mencakup ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem perkotaan, dan jaringan prasarana.
- d. Indikasi program sebagai operasionalisasi rencana pola ruang dan struktur ruang khususnya untuk bidang Cipta Karya.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) diperlukan sebagai dasar pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. Pada pembangunan infrastruktur skala kawasan, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan pada lokasi KSK, dan diharapkan keterpaduan pembangunan dapat terwujud.

Tabel 3.3
Arahan RTRW Kabupaten/Kota untuk Bidang Cipta Karya

ARAHAN POLA RUANG	ARAHAN STRUKTUR RUANG
(1)	(2)
Kawasan budidaya : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya.	PKNp/ PKW: Palabuhanratu PKL: Jampang Tengah, Jampang Kulon, Sagaranten, Cibadak. PPK: Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja, Surade PPL: 36 Kecamatan diluar PKL dan PPK

*Pusat Kegiatan Nasional–sistem Provinsi (PKNp),
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),
Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
Pusat Pengembangan Kawasan (PPK),
dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).*

Tabel 3.4
Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) berdasarkan RTRW

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	SUDUT KEPENTINGAN	LOKASI/ BATAS KAWASAN
(1)	(2)	(4)
KSK Perkotaan Cibadak	Ekonomi	Kecamatan Cibadak
KSK Perkotaan Palabuhanratu	Ekonomi	Kecamatan Palabuhanratu
KSK Agribisnis Purabaya	Ekonomi	Kecamatan Purabaya
KSK Koridor Ekonomi Berkelanjutan Cicurug-Sukabumi –Sukalarang;	Ekonomi	1. Kecamatan Cicurug 2. Kecamatan Cidahu 3. Kecamatan Parungkuda 4. Kecamatan Cibadak

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	SUDUT KEPENTINGAN	LOKASI/ BATAS KAWASAN
(1)	(2)	(4)
		5. Kecamatan Cisaat 6. Kecamatan Sukabumi 7. Kecamatan Sukaraja 8. Kecamatan Sukalarang
KSK Koridor Pesisir Sukabumi	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	kawasan sepanjang pesisir yang meliputi 9 kecamatan yaitu Ciselok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Cibitung, Surade, dan Tegalbuleud.

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sebagai “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah dengan kondisi riil saat dokumen perencanaan ini sedang dirumuskan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi sehingga terjadi kesenjangan tersebut. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi serta bagaimana visi dan misi Kabupaten Sukabumi dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi hingga akhir periode pelaksanaan pembangunan nanti.

Permasalahan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 untuk Bidang Infrastruktur antara lain :

- Belum terwujudnya tertib pemanfaatan ruang
- Tingginya angka kejadian bencana
- Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan
- Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
- Masih minimnya sarana dan prasarana dasar permukiman
- Masih tingginya masyarakat yang memiliki perumahan tidak layak huni
- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan
- masih rendahnya kinerja pelayanan transportasi
- Tingginya angka kecelakaan
- Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup;

Dari isu dan permasalahan diatas, Dinas Pekerjaan Umum memberikan gambaran tentang isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

3.5.1 Isu – Isu Strategis Bidang Bina Marga

a. Perbedaan aksesibilitas

Aksesibilitas di Kab. Sukabumi bagian utara sudah memadai, sementara untuk Kab.Sukabumi bagian Selatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah.Hal ini menimbulkan ketimpangan perkembangan wilayah.Untuk itu perlu perhatian khusus agar aksesibilitas ini bisa lebih diseimbangkan.Peningkatan/pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah, terutama jalan-jalan poros barat–timur yang menghubungkan jalan nasional/propinsi (poros utara–selatan) perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas penanganannya.

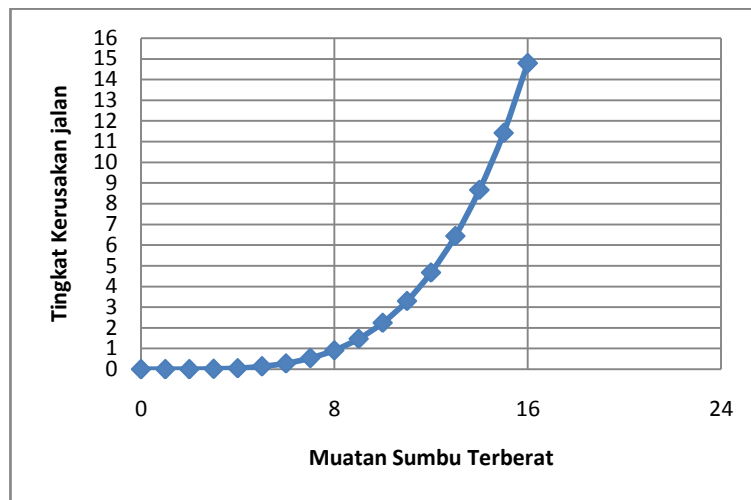
b. Sebagian ruas jalan berada pada jalur rawan bencana

Kondisi geografis dan kondisi tanah yang labil di beberapa wilayah/lokasi di Kabupaten Sukabumi merupakan kendala tersendiri.Kondisi tersebut banyak menyebabkan terjadinya longsor yang kadang kala membuat ruas jalan terputus/terhambat lalu lintasnya. Selain itu, perkembangan pembangunan di masyarakat semakin besar, sebagai konsekuensinya, kebutuhan akan lahan pun semakin banyak. Hal ini berdampak kepada semakin banyaknya dilakukan penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air hujan tidak terserap oleh akar–akar pohon tapi menjadi air permukaan (*surface run-off*) yang tidak bisa ditampung oleh saluran drainase yang ada sehingga kondisi tebing menjadi labil karena naiknya kadar air tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan longsor. Penanganan jalan yang putus atau rusak akibat bencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan hal ini mempunyai konsekuensi terganggunya alokasi untuk penanganan jalan yang sudah diprogramkan.

c. Muatan lebih (*over load*)

Merujuk pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, maka jalan Kabupaten dapat dikategorikan pada jalan kelas III dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 ton. Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang menjadi akses ke lokasi sumber *quarry* (Galian C) dan industri, beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST). Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan 2 kali pada beban as standar (beban as 16 ton), mengakibatkan tingkat kerusakan hampir sebesar 16 kalinya (**Gambar III. 4 Korelasi Antara**

Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan. Muatan berlebih ini merupakan salah satu penyebab menjadi pendeknya umur jalan



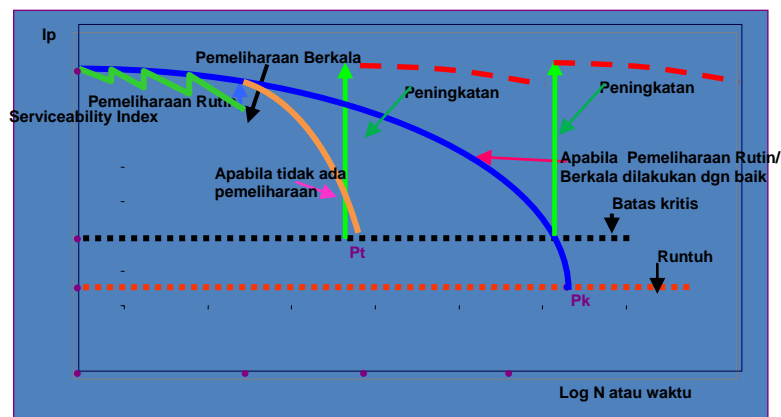
Gambar III. 4 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan

d. Pentingnya Pemeliharaan jalan

Apabila pemeliharaan tidak diselenggarakan dengan baik (efektif dan efisien), maka akan timbul kerugian berlipat ganda pada masyarakat, terutama pengguna jalan. Untuk mempertahankan kondisi perkerasan jalan diperlukan pemeliharaan jalan, baik rutin maupun berkala (periodik). Apabila salah satu dari kedua jenis pemeliharaan ini tidak dilaksanakan, maka umur perkerasan menjadi semakin pendek (jalan cepat rusak). Hal ini mengakibatkan biaya penanganan akan menjadi lebih besar. Dimana perkerasan yang telah mencapai kondisi kritis membutuhkan penanganan berupa peningkatan jalan dengan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan pemeliharaan.

Dikarenakan oleh penambahan volume lalu lintas maupun intensitas beban yang terus meningkat, termasuk *overloading* yang tak terkendali, maka amatlah penting dan strategis posisi pemeliharaan jalan sebagaimana yang tercantum didalam Undang – Undang Republik Indonesia No.38 tahun 2004 Tentang Jalan, pasal 30 ayat 1 huruf b, yaitu: “penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan”. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 2006 Tentang Jalan, pasal 97 ayat 3, dikatakan bahwa “pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi”. Oleh karena itu, pemeliharaan harus dilakukan sebelum jalan tersebut kondisinya menurun menjadi rusak. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yang salah satunya adalah tuntutan masyarakat agar

semua ruas ditangani. Mereka mempertanyakan bahwa jalan yang ditangani adalah jalan yang ada dalam kondisi baik dan sedang sementara jalan yang rusak tidak mendapat penanganan. Mereka lebih memilih bahwa jalan baik dan sedang dibiarkan saja (tidak mendapat pemeliharaan) dan anggarannya dialokasikan pada penanganan jalan rusak. Apabila hal ini dilakukan, tentunya tingkat kemantapan jalan tidak akan dapat dijaga, bahkan untuk skala jaringan akan terus menurun. (Gambar III. 5 Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan Waktu)



Gambar III. 5 Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan Waktu

e. Sebagian dari Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Rencananya

Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5–10 tahun sekali (tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana, maka saat ini banyak ruas jalan yang hanya mendapat penanganan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan pemeliharaan berkala, Hanya sedikit yang mendapatkan penanganan berupa peningkatan jalan, padahal kondisi jalan sebagian besar sudah rusak, sehingga banyak ruas jalan yang tidak tertangani (terjadi *backlog*). Kondisi ini terjadi dari tahun ke tahun, bahkan permasalahan *backlog* tahun sebelumnya terbawa ke tahun anggaran berikutnya, dan hal ini semakin menambah beban dalam penanganan jalan.

f. Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai

Sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar, pasar tumpah, parkir sembarangan, penggunaan kendaraan dengan muatan lebih atau tidak sesuai kelas jalan, dan lain-lain. Hal ini sangat mengganggu fungsi jalan (mengurangi kapasitas jalan) dan juga untuk beberapa kasus dapat mempercepat tingkat kerusakan jalan.

g. Kapasitas segmen tertentu dari ruas Jalan Nasional sudah tidak dapat memenuhi volume lalu lintas

Pada segmen tertentu dari ruas jalan nasional terjadi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini diakibatkan tingginya volume lalu lintas yang dibangkitkan dari adanya kegiatan ekonomi disepanjang jalan nasional dan penggunaan lahan disepanjang ruas jalan tersebut yang cenderung mengganggu lalu lintas. Problem ini akan bertambah parah apabila rencana pembangunan jalan tol tahap I antara Ciawi-Lido terwujud. Problem kemacetan akan semakin parah karena akan terjadi penumpukan kendaraan di sekitar pintu tol Lido dan akan membebani ruas jalan disekitarnya, termasuk jalan nasional.

h. Adanya Kegiatan dari Sektor/Dinas/Instansi Lain

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pada saat ini adalah pendekatan kewilayahan. Semua program dari berbagai sektor bisa masuk pada suatu wilayah dengan tujuan agar didapat manfaat yang signifikan bagi wilayah bersangkutan. Contoh dari program demikian adalah Agropolitan dan Minapolitan. Menyikapi hal tersebut, diperlukan sinkronisasi program agar program dari setiap Dinas/Instansi dapat saling mendukung.

3.5.2 Isu – Isu Strategis Bidang Pengairan

Untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, pengelolaan sumber daya air khususnya pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

- 1 Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi;
- 2 Pengembangan dan pengelolaan irigasi belum optimal;
- 3 Terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama di wilayah kabupaten bagian utara;
- 4 Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih kurang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 5 Partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal;
- 6 Ketersediaan, kualitas serta akses terhadap sistem data dan informasi masih rendah sehingga belum mendukung efektivitas kerja;
- 7 Koordinasi antar instansi, antara pemerintah (pusat, provinsi) dan antar kepentingan belum optimal;
- 8 Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga menyebabkan rendahnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

8.5.1 Isu – Isu Strategis Bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, adapun Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (*Strenghts*) adalah :
 1. Eksistensi Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara pengelolaan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi (Perbup Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi);
 2. Peraturan perundangan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang yang mendukung pengelolaan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang (UU no 1 thn 2011, UU No. 28 tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2005, dan Kepmen PU lainnya)
 3. Tersedianya SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan
 4. Terjalannya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait;
 5. Tersedianya database keciptakaryaan
 6. Tersedianya Rencana Induk/Masterplan bidang Keciptakaryaan dan tata Ruang
- b. Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (*Weakness*) adalah :
 1. Penyelenggaraan pengelolaan keciptakaryaan dan penataan ruang belum sinergi
 2. Peraturan perundangan bidang keciptakaryaan belum sepenuhnya dapat diterapkan/diimplementasikan
 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang
 4. Belum tertanganinya cakupan pelayanan Keciptakaryaan dan penataan ruang

5. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang
 6. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi dinas/instansi serta pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang Bangunan danPenyehatan Lingkungan serta jasa konstruksi;
 7. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan SPM
- c. Lingkungan Eksternal yang menjadi Peluang (*Opportunity*) adalah :
1. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pekerjaan Umum sebagai lembaga teknis daerah di bidang infrastruktur;
 2. Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM, dan Air limbah yang belum diberdayakan.
 3. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
 4. Tuntutan penerapan Good Governance melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
 5. Komitmen terhadap kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dan Protocol Kyoto dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus berimbang dengan pembangunan perdesaan.
 6. Tuntutan peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha/swasta.
- d. Lingkungan Eksternal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah :
1. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang tentang Sistem Pengelolaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Drainase, Pengelolaan Bangunan Gedung Negara, Jasa Konstruksi, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHKP);
 2. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Bangunan dan Penyehatan Lingkungan;
 3. Rendahnya kesadaran masyakat dan belum diberdayakannya potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan bidang Pekerjaan Umum serta terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat.
 4. Masih adanya *mindset* bahwa pengelolaan air minum, air limbah, adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah;

5. Dukungan finansial terhadap pembangunan dan pengembangan pelayanan bidang Pekerjaan Umum masih rendah

8.5.2 Isu – Isu Strategis Bidang Alat Berat dan Laboratorium

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi :

1. Alat – alat berat yang sudah berumur lebih dari 10 tahun dan efektifitasnya sudah tidak lagi maksimal
2. Biaya pemeliharaan alat berat yang mahal
3. Belum adanya peremajaan kendaraan alat – alat berat
4. Masih kurangnya alat berat guna mendukung apabila terjadi bencana alam
5. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan adanya peralatan alat berat.
6. Penyediaan alat – alat laboratorium yang masih kurang mempuni.
7. Belum adanya sertifikasi bagi para pengelola laboratorium
8. Perlu adanya pelatihan tentang alat-alat laboratorium

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Sukabumi maka dalam implementasinya Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi lebih mengarahkan program dan kegiatan sejalan dengan visi misi tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih operasional.

Tujuan merupakan target bersifat kuantitatif atau kualitatif dari suatu organisasi yang pencapaiannya merupakan ukuran keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan bersifat jangka panjang, serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai, diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Sedangkan sasaran merupakan gambaran nyata yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil organisasi untuk mencapai tujuan. Sasaran lebih bersifat spesifik, kuantitatif terukur, berorientasi ke hasil, dan dapat dicapai dalam kerangka waktu relatif singkat (misal tahunan). Adapun Tujuan dari Dinas PU Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian

Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air
4. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

5. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi

Proses penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sebagai kelanjutan dari penyusunan faktor-faktor kunci keberhasilan. Setiap faktor kunci keberhasilan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan. Setiap tujuan dijabarkan kedalam sasaran- sasaran dan setiap sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan dijabarkan kedalam program-program.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting (2015)		TARGERT KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur										
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	pelayanan informasi tentang Infrastruktur	Dok	9	9	10	10	10	11	11	
		persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	42.85	42.85	46.85	50.85	54.85	57.85	59.85	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting (2015)		TARGERT KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	98.55	0	98.55	98.55	98.84	99.06	Pembangunan segmen 1
		ketersediaan sarana pengelolaan jalan	Unit	0	60	65	70	60	60	60
		Terbangunnya ruas jalan baru lingkaran utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)	Dok	0	1 dok FS	1 dok amdal	1 dok DED	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2
		Terbangunnya ruas jalan baru lingkaran utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)	Dok	0	1 dok FS	1 dok amdal	1 dok DED	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting (2015)		TARGERT KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pembangunan jalan lintas (Palabuhanratu-Cisolok)	Dok	1	0	1 dok amdal	1 dok DED	Pengadaan lahan 1 Ruas (segment 1)	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segment 2), Pembangunan segment 1	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segment 3), Pembangunan segment 2
		Pembangunan jalan (Cibutun-Balewer)	Dok	1	1 dok amdal	1 dok DED	Pengadaan lahan 1 Ruas (segment 1)	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segment 2), Pembangunan segment 1	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segment 3), Pembangunan segment 2 serta Pembangunan Jembatan	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segment 4), Pembangunan segment 3
		Pembangunan jalan (Situhang - Mareleng)	dok	0	0	1 dok amdal	1 dok DED	Pengadaan lahan 1 Ruas (segment 1)	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segment 2), Pembangunan segment	Pembangunan segment 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting (2015)		TARGERT KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
									n 1 Serta Pembangunan Jembatan	
	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	57	57	62	68	73	77	82
		peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarananya	%	12	12	18	24	30	36	42
		Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	%	41	41	47	52	57	63	69
	meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	5	5.05	6	6.5	7	7.5	8
		Cakupan layanan air minum perdesaan	%	54.95	56	57	58	59	60	61.00
		cakupan pelayanan air minum perkotaan		9.62	9.62	13.14	16.66	20.18	23.7	27.22

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting (2015)		TARGERT KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		cakupan pelayanan air limbah domestic	%	35.55	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	42
		Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	3.45	5.45	7.45	9.45	11.45	13.45	15
		Pengurangan Luas Genangan	%	47.50%	42.5	37.5	32.5	27.5	22.5	17.5
		cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi	%	23	34	44	53	60	68	78
		cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	%	100	100	100	100	100	100	100

4.2. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Dengan menggunakan pendekatan strategik management system, didapat beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi untuk mencapai tujuan seperti yang tertera di statement visi dan misi Bupati Sukabumi di atas antara lain :

- Meningkatkan kualitas dan Kompetensi aparatur
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- Standarisasi pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah
- meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang
- meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air
- meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman
- meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara

4.3. Kebijakan

Dengan memperhatikan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, secara konsisten disusun dalam bentuk kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang relevan serta merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi instansi pelaksana.

Maka kebijakan terhadap Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, antara lain :

- a. Peningkatan Profesionalisme anggota KORPRI
- b. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat
- c. Menyusun dokumen terkait kondisi dan status jalan kabupaten
- d. Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)
- e. Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)
- f. Pembangunan jalan lintas Palabuhanratu- Cisolok

- g. Pembangunan jalan Cibusun- Balewer
- h. Pembangunan jalan Situhiang - Mareleng
- i. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya air
- j. peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumber daya air dan irigasi
- k. Pengendalian daya rusak air
- l. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perdesaaan
- m. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum Perkotaan
- n. peningkatan cakupan layanan air limbah domestik
- o. peningkatan cakupan layanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan Kompetensi aparatur • Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Profesionalisme anggota KORPRI
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian	- meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	- meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	<ul style="list-style-type: none"> - • Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dana jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat • Menyusun dokumen terkait kondisi dan status jalan kabupaten - • Pembangunan jalan lingkaran utara sukabumi (Cicurug - Cibadak) • Pembangunan jalan lingkaran utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang) • Pembangunan jalan lintas palabuhanratu-cisolok • Pembangunan jalan cibusun-balewer • Pembangunan jalan Situhiang - Mareleng

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
-	- Meningkatkan infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.	- meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air	- <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendayagunaan sumberdaya air • peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumber daya air dan irigasi • Pengendalian daya rusak air •
-	- meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	- meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman	- <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perdesaaan • Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum Perkotaan • Peningkatan cakupan layanan air limbah domestik • Peningkatan cakupan layanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Bab 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun program prioritas secara operasional Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dalam kurun 5 (lima) tahunan, juga berpedoman pada pedoman operasional yang tertuang dalam Kebijakan Regional. Relevan dengan kebijaksanaan diatas, maka pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) di Kabupaten Sukabumi disusun dalam 7 (tujuh) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Jalan dan Jembatan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya
9. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
12. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

5.2. Kegiatan

Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek dibandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu

program. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) diprioritas pada kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
3. Pelayanan Administrasi Aset
4. Pengadaan Mebelair
5. Pemeliharaan/Pengelolaan peralatan dan perlengkapan alat-alat labortorium
6. Pengadaan alat-alat laboratorium
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
11. Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus
12. Pendidikan dan pelatihan formal
13. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja
14. Penyusunan program, evaluasi, pelaporan capaian kinerja program dan kegiatan
15. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan
16. Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan
17. Pembangunan/Peningkatan Jalan
18. Bertambahnya Ruas Jalan Yang Menghubungkan Pusat - Pusat Kegiatan Dan Pusat Produksi Di Wilayah Kabupaten
19. Pembuatan Dok Amdal
20. Pembuatan Dok DED
21. Pengadaan Lahan
22. Pembangunan Jalan Alternatif
23. Pembangunan jalan lingkaran utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)
24. pengadaan sarana pengelolaan jalan
25. Pengadaan Alat Berat
26. Pembangunan jalan lingkaran utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)
27. Pembuatan Dok Fisibility Study (FS)
28. Pembuatan Dok Amdal
29. Pembuatan Dok DED
30. Pengadaan Lahan
31. Pembangunan Jalan Alternatif

32. Pembangunan Jalan Lintas Palabuhanratu-Cisolok
33. Pembuatan Dok Amdal
34. Pembuatan Dok DED
35. Pengadaan Lahan
36. Pembangunan Jalan Alternatif
37. Pembangunan Jalan Cibutun-Balewer
38. Pembuatan Dok Amdal
39. Pembuatan Dok DED
40. Pengadaan Lahan
41. Pembangunan Jalan Alternatif
42. Pembangunan jalan Situhiang - Mareleng
43. Pembuatan Dok Amdal
44. Pembuatan Dok DED
45. Pengadaan Lahan
46. Pembangunan Jalan Alternatif
47. Perencanaan Jalan
48. Perencanaan Jembatan
49. Survey kondisi data jalan
50. Survey kondisi data jembatan
51. Survey Menggunakan IRI
52. Kegiatan Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA)
53. Kegiatan Pengendalian dan Daya Rusak Air
54. Kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Bendung
55. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
56. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
57. Pengelolaan Sungai di Sekitar Ibukota Kabupaten
58. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
59. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten
60. Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi
61. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
62. Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif Program - WISMP
63. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aset Irigasi (SISPAI)
64. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten - Program DAK
65. Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi - Bantuan Keuangan Provinsi

66. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dengan GP3A/P3A MC
67. Pemberdayaan GP3A/P3A Mitra Cai
68. Penyusunan DED Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perdesaan
69. Penyusunan DED Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perkotaan
70. Penyediaan Sistem Pelayanan Air Minum
71. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
72. Sinergitas Sistem Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
73. Penyediaan Sanitasi Masyarakat MCK
74. Sinergitas Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)
75. Review Memorandum Pembangunan Sanitasi
76. Infrastruktur air limbah dengan sistem on site
77. Infrastruktur air limbah dengan sistem Setempat dan Sistem Komunal
78. Penyediaan infrastruktur IPAL Komunal dan MCK Kombinasi
79. Penyusunan Masterplan Drainase
80. Pembangunan Drainase Perkotaan
81. Pembangunan Kolam Retensi
82. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
83. Penyusunan Database Bangunan Gedung Negara
84. Sinergitas Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
85. Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan
86. Pembangunan PUSBANGDA'I Kabupaten Sukabumi
87. Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi
88. Updating SIPJAKI
89. Sinergitas Rekomendas Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
90. Sosialisasi Norma dan Aturan Jasa Konstruksi

Untuk lebih jelasnya, relevansi antara kebijakan, program, dan kegiatan untuk anggaran tahun 2016 sampai tahun 2021 dan selanjutnya dapat dilihat lebih rinci pada tabel 5.1. Matrik Pembiayaan Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 - 2021 pada lampiran.

5.3. Indikator Kinerja

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 –2021 antara lain:

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
DINAS PEKERJAAN UMUM																				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	100	4,105	100	4,516	100	4,968	100	5,464	100	6,011	100	6,612	100	31,676		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	100	2,106	100	2,317	100	2,548	100	2,803	100	3,083	100	3,392	100	16,249		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur		%	100	100	199	100	219	100	241	100	265	100	292	100	321	100	1,538		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	100	274	100	301	100	331	100	364	100	401	100	441	100	2,111		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	100	100	244	100	269	100	296	100	325	100	358	100	393	100	1,885		DINAS PEKERJAAN UMUM
program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	pelayanan informasi tentang Infrastruktur	penyediaan dokumen jalan	dok	9	9	1,000	10	500	10	500	10	750	11	1,000	11	2,300	61	6,050		DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	1. meningkatnya kemandapan jalan kabupaten yang masuk dalam katagori mantap (kondisi baik dan sedang).	%	42.85	42.85	104,753	46.85	145,750	50.85	171,350	54.85	192,850	57.85	210,280	59.85	196,010	59.85	1,020,993		DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan	Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	98.55	0	-	98.55	500.000	98.55	1,000.000	98.84	55,800.000	99.06	100.000	Pembangunan segmen 1	85,000.000	99.06	142,400.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan	ketersediaan sarana pengelolaan jalan	pengadaan sarana pengelolaan jalan	unit	0	6	5,000	6	7,170	7	13445	6	6,850	6	7,205	6	13,000	85	30,000		DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
program jalan dan jembatan	Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)	dok	0	1 dok FS	300	1 dok amdal	400	1 dok DED	1000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	30,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	80,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	80,000	3 dok dan 1 ruas	191,700	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)	dok	0	1 dok FS	300	1 dok amdal	400	1 dok DED	1000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	30,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	80,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	80,000	3 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	191,700	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan lintas palabuhanratu-cisolok	dok	1	0	-	1 dok amdal	400	1 dok DED	1,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	50,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	85,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	85,000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	221,400	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan cibitung-balewer	dok	1	1 dok amdal	300	1 dok DED	1,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	75,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	110,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2 serta Pembangunan Jembatan	140,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 4), Pembangunan segmen 3	110,000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	436,300	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan Situhiang - Marelang	dok	0	0	-	1 dok amdal	300	1 dok DED	600	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	25,500	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1 Serta Pembangunan Jembatan	56,000	Pembangunan segmen 2	35,000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	117,400	DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	57	57	10,000	62	30,600	68	33,660	73	36,960	77	38,100	82	40,500	82	189,820	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarananya		%	12	12	500	18	750	24	1,000	30	1,200	36	1,450	42	1,700	42	6,600	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	tersedianya infrastruktur sumberdaya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai	%	41	41	15,000	47	23,500	52	25,700	57	28,200	63	32,000	69	34,000	69	158,400	DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat	%	5	5,05	12,000	6	10,000	6,5	11,000	7	12,100	7,5	13,310	8	14,641	60	73,051	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan layanan air minum perdesaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	54,95	56	72,000	57	10,000	58	11,000	59	12,100	60	13,310	61,00	14,641	95	133,051	DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	cakupan pelayanan air minum perkotaan	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum ditingkat perkotaan		9.62	9.62	1,000	13.14	1,000	16.66	1,000	20.18	1,000	23.7	1,000	27.22	1,000	27.22	5,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	cakupan pelayanan air limbah domestik	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	35.55	36.5	96,000	37.5	80,000	38.5	88,000	39.5	96,800	40.5	106,480	42	117,128	75	584,408	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	persentase jumlah masyarakat yang terlayani terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.	%	3.45	5.45	20,000	7.45	10,000	9.45	11,000	11.45	12,100	13.45	13,310	15	14,641	35	81,051	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Pengurangan Luas Genangan	persentase luasan yang masih tergenang di suatu Kota/Kabupaten terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	%	47.50%	42.5	2,300	37.5	1,500	32.5	1,650	27.5	1,815	22.5	1,997	17.5	2,196	20	11,458	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program pembinaan jasa konstruksi	cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi	tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	23	34	200	44	200	53	200	60	200	68	200	78	200	78	1,200	DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program pembinaan jasa konstruksi	cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	550	DINAS PEKERJAAN UMUM

Bab 6

INDIKATOR KINERJADINAS PEKERJAAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021, dilengkapi dengan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, indikator dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 yang hendak dicapai adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, terkait tupoksi Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi terdapat pada misi 4 yaitu :**Optmalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Sedangkan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut

:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
DINAS PEKERJAAN UMUM																				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	100	4,105	100	4,516	100	4,968	100	5,464	100	6,011	100	6,612	100	31,676		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	100	2,106	100	2,317	100	2,548	100	2,803	100	3,083	100	3,392	100	16,249		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur		%	100	100	199	100	219	100	241	100	265	100	292	100	321	100	1,538		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	100	274	100	301	100	331	100	364	100	401	100	441	100	2,111		DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%	100	100	244	100	269	100	296	100	325	100	358	100	393	100	1,885		DINAS PEKERJAAN UMUM
program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	pelayanan informasi tentang Infrastruktur	penyediaan dokumen jalan	dok	9	9	1,000	10	500	10	500	10	750	11	1,000	11	2,300	61	6,050		DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	1. meningkatnya kemandapan jalan kabupaten yang masuk dalam katagori mantap (kondisi baik dan sedang).	%	42.85	42.85	104,753	46.85	145,750	50.85	171,350	54.85	192,850	57.85	210,280	59.85	196,010	59.85	1,020,993		DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan	Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	98.55	0	-	98.55	500.000	98.55	1,000.000	98.84	55,800.000	99.06	100.000	Pembangunan segmen 1	85,000.000	99.06	142,400.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan	ketersediaan sarana pengelolaan jalan	pengadaan sarana pengelolaan jalan	unit	0	6	5,000	6	7,170	7	13445	6	6,850	6	7,205	6	13,000	85	30,000		DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
program jalan dan jembatan	Terbangunnya ruas jalan baru	Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Cicurug - Cibadak)	dok	0	1 dok FS	300	1 dok amdal	400	1 dok DED	1000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	30,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	80,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	80,000	3 dok dan 1 ruas	191,700	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan lingkar utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)	dok	0	1 dok FS	300	1 dok amdal	400	1 dok DED	1000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	30,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	80,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	80,000	3 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	191,700	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan lintas palabuhanratu-cisolok	dok	1	0	-	1 dok amdal	400	1 dok DED	1,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	50,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	85,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	85,000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	221,400	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan cibutun-balewer	dok	1	1 dok amdal	300	1 dok DED	1,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	75,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	110,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2 serta Pembangunan Jembatan	140,000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 4), Pembangunan segmen 3	110,000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	436,300	DINAS PEKERJAAN UMUM
program jalan dan jembatan		Pembangunan jalan Situhiang - Mareleng	dok	0	0	-	1 dok amdal	300	1 dok DED	600	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	25,500	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1 Serta Pembangunan Jembatan	56,000	Pembangunan segmen 2	35,000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	117,400	DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	57	57	10,000	62	30,600	68	33,660	73	36,960	77	38,100	82	40,500	82	189,820	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarananya		%	12	12	500	18	750	24	1,000	30	1,200	36	1,450	42	1,700	42	6,600	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	tersedianya infrastruktur sumberdaya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai	%	41	41	15,000	47	23,500	52	25,700	57	28,200	63	32,000	69	34,000	69	158,400	DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat	%	5	5,05	12,000	6	10,000	6,5	11,000	7	12,100	7,5	13,310	8	14,641	60	73,051	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan layanan air minum perdesaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	54,95	56	72,000	57	10,000	58	11,000	59	12,100	60	13,310	61,00	14,641	95	133,051	DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	cakupan pelayanan air minum perkotaan	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum ditingkat perkotaan		9.62	9.62	1,000	13.14	1,000	16.66	1,000	20.18	1,000	23.7	1,000	27.22	1,000	27.22	5,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	cakupan pelayanan air limbah domestik	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	35.55	36.5	96,000	37.5	80,000	38.5	88,000	39.5	96,800	40.5	106,480	42	117,128	75	584,408	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	persentase jumlah masyarakat yang terlayani terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.	%	3.45	5.45	20,000	7.45	10,000	9.45	11,000	11.45	12,100	13.45	13,310	15	14,641	35	81,051	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Pengurangan Luas Genangan	persentase luasan yang masih tergenang di suatu Kota/Kabupaten terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	%	47.50%	42.5	2,300	37.5	1,500	32.5	1,650	27.5	1,815	22.5	1,997	17.5	2,196	20	11,458	DINAS PEKERJAAN UMUM
Program pembinaan jasa konstruksi	cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi	tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	23	34	200	44	200	53	200	60	200	68	200	78	200	78	1,200	DINAS PEKERJAAN UMUM

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program pembinaan jasa konstruksi	cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	550	DINAS PEKERJAAN UMUM

Adapun Secara jelas mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Strategi, Kebijakan , Program dan Kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2014 – 2019, dan RPJM Daerah Propinsi Jawa Barat 2014 – 2018. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu – isu strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Diharapkan dapat menjadi komitmen bersama dalam menentukan arah dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dalam menunjang visi misi Kabupaten Sukabumi sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pengelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penacapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rancangan Renstra ini;
2. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan, baik dalam satu program maupun antar program dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peranserta masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam rangka perumusan dan perancangan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum;

4. Dengan mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder, Dinas Pekerjaan Umum dapat merumuskan matriks rencana tindak lanjut untuk setiap program sebagai bahan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum tahunan;
5. Revisi dan penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Penganggaran program dan kegiatan yang menjadi sasaran kinerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen serta konsistensi bersama antara Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 – 2021 sehingga sasaran kinerja dapat tercapai.

LAMPIRAN

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		21021		Target	Rp.		
								target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pembuatan Dok DED			dok						1	1000										
			Pengadaan Lahan			segmen						1	55.800		1	27.900							
			Pembangunan Jalan Alternatif			segmen									1	27.900	1	55.800					
			Pembangunan jalan lingkak utara sukabumi (Sukaraja-Sukalarang)	Terbangunnya ruas jalan baru		dok	0	1 dok FS	300	1 dok amdal	400	1 dok DED	1000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	30.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	80.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	80.000	3 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	191.700		
			pengadaan sarana pengelolaan jalan	ketersediaan sarana pengelolaan jalan		unit		6	5.000	6	7.170	7	13.445	6	6.850	6	7.205	6	13.000	37	30.000		
			Pengadaan Alat Berat			Unit		6	5000	6	7170	7	13445	6	6850	6	7205	6	13000				
			Pembangunan jalan lingkak utara sukabumi (Cicurug- Cibadak)			dok	0	1 dok FS	300	1 dok amdal	400	1 dok DED	1000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	30.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	80.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	80.000	3 dok dan 1 ruas	191.700		
			Pembuatan Dok Fisibility Study (FS)			dok	1	300															
			Pembuatan Dok Amdal			dok				1	400												
			Pembuatan Dok DED			dok						1	1000										
			Pengadaan Lahan			segmen								1	30.000	1	40.000	1	40.000				
			Pembangunan Jalan Alternatif			segmen									1	40.000	1	40.000					
			Pembangunan jalan lintas Palabuhanratu - Cisolok	Terbangunnya ruas jalan baru		dok	1	0	-	1 dok amdal	400	1 dok DED	1.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	50.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	85.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2	85.000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	221.400		
			Pembuatan Dok Amdal			dok				1	400												
			Pembuatan Dok DED			dok						1	1.000										
			Pengadaan Lahan			segmen								1	50.000	1	42.500	1	42.500				
			Pembangunan Jalan Alternatif			segmen									1	42.500	1	42.500					
			Pembangunan jalan Cibutun - Balewer	Terbangunnya ruas jalan baru		dok	1	1 dok amdal	300	1 dok DED	1.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	75.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1	110.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 3), Pembangunan segmen 2 serta Pembangunan Jembatan	140.000	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 4), Pembangunan segmen 3	110.000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	436.300		
			Pembuatan Dok Amdal			dok	1	300															
			Pembuatan Dok DED			dok				1	1.000												
			Pengadaan Lahan			segmen						1	75.000	1	110.000	1	140.000	1	110.000				
			Pembangunan Jalan Alternatif			segmen								1	110.000	1	140.000	1	110.000				

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		21021		Target	Rp.	
								target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pembangunan jalan Situhiang - Marelang	Terbangunnya ruas jalan baru		dok	0	0	-	1 dok amdal	300	1 dok DED	600	Pengadaan lahan 1 Ruas (segmen 1)	25.500	Pengadaan lahan 1 Ruas (Segmen 2), Pembangunan segmen 1 Serta Pembangunan Jembatan	56.000	Pembangunan segmen 2	35.000	2 dok dan 1 ruas jalan dan jembatan terbangun	117.400	
			Pembuatan Dok Amdal			dok				1	300											
			Pembuatan Dok DED			dok						1	600									
			Pengadaan Lahan			segmen								1	12.750	1	28.000	1	17.500			
			Pembangunan Jalan Alternatif			segmen								1	12.750	1	28.000	1	17.500			
			program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	pelayanan informasi tentang Infrastruktur	penyediaan dokumen Kebinamargaan	dok	5	5	1.000	5	500	5	500	5	750	5	1.000	5	2.300	61	6.050	
			Perencanaan Jalan			dok	1	300	1	100	1	100	1	200	1	300	1	700				
			Perencanaan Jalan Jembatan			dok	1	300	1	100	1	100	1	200	1	300	1	700				
			Survey kondisi data jalan			dok	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	300				
			Survey kondisi data jembatan			dok	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	300				
			Survey Menggunakan IRI			dok	1	200	1	100	1	100	1	150	1	200	1	300				
	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air		Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten		%	57	57	10.000	62	30.600	68	33.660	73	36.960	77	38.100	82	40.500	82	189.820	
			peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi baik SDM, regulasi maupun sarana prasarannya			%	12	12	500	18	750	24	1.000	30	1.200	36	1.450	42	1.700	42	6.600	
			Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			%	41	41	15.000	47	23.500	52	25.700	57	28.200	63	32.000	69	34.000	69	158.400	
			Kegiatan Penyusunan Bahan Data Base Sumber Daya Air (SISDA)	<i>Tersedianya data dan kondisi sarana dan prasarana sumber daya air</i>																		
			Data Infrastruktur SDA			Daerah	31 DI	133	32 DI	133	31 DI	133	31 DI	133	32 DI	133	157 DI	133	157 DI	670		
			Profil Daerah Irigasi			Daerah Irigasi	31 DI		32 DI		31 DI		31 DI		32 DI		157 DI		157 DI			
			Pengembangan GIS			Daerah Irigasi	31 DI		32 DI		31 DI		31 DI		32 DI		157 DI		157 DI			
			Kegiatan Pengendalian dan Daya Rusak Air	<i>Terjaganya sumber pasokan air baku irigasi</i>																		
			Talud			Sg	40	4.388	40	3.657	40	3.657	40	3.657	40	3.657	40	3.657	40	3.657	200	18.287
			TPT			Sg	40		40		40		40		40		40		40		200	
			Pasangan Bronjong			Sg	40		40		40		40		40		40		40		200	
			Kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Bendung	<i>Terjaganya ketersediaan air baku irigasi</i>																		
			Perbaikan Bendung			DI	21		21	6.802	21	5.669	21	5.669	21	4.535	21	5.669	103	28.345		
			Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya																			
			Bangunan Embung			Embung	2	614	2	512	2	512	2	512	2	409	2	512	10	2.560		

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		21021		Target	Rp.		
								target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten - Program DAK	Terlaksananya pengembalian kondisi dan fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK							6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		30.000		
			Bangunan Air			DI				20		20		20		20		20		20		100	
			Saluran Pasangan			DI				20		20		20		20		20		20		100	
			TPT			DI				20		20		20		20		20		20		100	
			Normalisasi Saluran Pasangan Bronjong			DI				20		20		20		20		20		20		100	
			Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi - Bantuan Keuangan Provinsi	Terlaksananya pengembalian kondisi dan fungsi jaringan irigasi melalui dana Bantuan Keuangan Provinsi							8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		40.000		
			Bangunan Air			DI				42		42		42		42		42		42		210	
			Saluran Pasangan			DI				42		42		42		42		42		42		210	
			TPT			DI				42		42		42		42		42		42		210	
			Normalisasi Saluran Pasangan Bronjong			DI				42		42		42		42		42		42		210	
			Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dengan GP3A/P3A MC	Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi bersama P3A Mitra Cai							3.169		3.803		2.535		3.169		3.169		15.849		
			Pembentukan P3A/GP3A			DI				51		51		51		51		51		51		254	
			Pelaks. Desain Partisipatif			DI				51		51		51		51		51		51		254	
			Pelaks. Perb. Partisipatif			DI				51		51		51		51		51		51		254	
			Pemberdayaan GP3A/P3A Mitra Cai	Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi bersama P3A Mitra Cai							237		285		190		237		237		1.188		
			Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Petani Pemakai Air/ P3A MC			DI				20		20		20		20		20		20		100	
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian	meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan layanan air minum perdesaan			44,95	46	72.000	47	10.000	48	11.000	49	12.100	50	13.310	51	14.641	51	133.051		
				cakupan pelayanan air minum perkotaan			9,62	9,62	1.000	10,62	1.000	11,62	1.000	12,62	1.000	13,62	1.000	14,62	1.000	14,62	1.000	5.000	
				Penyusunan DED Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perdesaan		Dok	0	1	500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500		
				Penyusunan DED Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perkotaan		Dok	0	0	-	1	500	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500		
				Penyediaan Sistem Pelayanan Air Minum		paket	7	3.000	7	3.000	8	3.500	8	3.500	8	3.500	8	3.500	8	3.500	46	20.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan		paket	342	68.400	37	7.400	42	8.400	48	9.500	54	10.710	60	12.041	583	116.451			
				Sinergitas Sistem Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)		tahun	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	6	600	
				cakupan pelayanan air limbah domestik			35,55	36,5	96.000	37,5	80.000	38,5	88.000	39,5	96.800	40,5	106.480	42	117.128	42	584.408		
				Penyediaan Sanitasi Masyarakat MCK		unit	1.700	84.800	1.350	68.700	1.300	64.970	1.400	71.560	1.500	77.580	1.600	83.368	8850	450.978			
				Sinergitas Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)		tahun	1	150	1	200	1	250	1	300	1	350	1	400	6	1.650			
				Review Memorandum Pembangunan Sanitasi		dok	1	250	0	-	1	250	0	-	1	250	0	-	3	750			
				Infrastruktur air limbah dengan sistem on site		lokasi	0	-	0	-	2	10.500	2	12.000	2	14.000	2	18.000	8	54.500			

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		21021		Target	Rp.		
								target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Infrastruktur air limbah dengan sistem Setempat dan Sistem Komunal			paket		10	7.800	10	7.800	10	7.900	10	7.900	10	8.000	10	8.000	60	47.400		
			Penyediaan infrastruktur IPAL Komunal dan MCK Kombinasi			paket		6	3.000	8	3.300	10	4.130	12	5.040	14	6.300	16	7.360	66	29.130		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota		%	3,45	5,45	20.000	7,45	10.000	9,45	11.000	11,45	12100	13,45	13310	15,45	14641	35	81.051		
				Pengurangan Luas Genangan		%	47,5	42,5	2.300	37,5	1.500	32,5	1.650	27,5	1815	22,5	1996,5	17,5	2196,15	20	11.458		
			Penyusunan Masterplan Drainase			Dok		1	800	1	800	0	-	0	0	0	0	0	0	2	1.600		
			Pembangunan Drainase Perkotaan			lokasi		108	21.500	40	7.700	48	9.650	70	13915	76	15307	84	16837	426	84.909		
			Pembangunan Kolam Retensi			lokasi		0	-	1	3.000	1	3.000	0	0	0	0	0	0	2	6.000		
			Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		%	5	5,05	12.000	6	10.000	6,5	11.000	7	12100	7,5	13.310	8	14.641	8	73.051		
			Penyusunan Database Bangunan Gedung Negara			Dok		1	150	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150		
			Sinergitas Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)			paket		1	300	1	300	1	300	1	350	1	350	1	350	6	1.950		
			Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan			paket		1	100	1	100	1	100	1	150	1	150	1	150	6	750		
			Pembangunan PUSBANGDA'I Kabupaten Sukabumi			paket		1	500	1	7000	0	0	0	-	0	-	0	-	2	7.500		
	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi		%	23	34	200	44	200	53	200	60	200	68	200	78	200	78	1.200		
				cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi		%	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	550	
				Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa			Orang		40	60	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	440	560	
				Updating SIPJAKI			Tahun		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	6	300	
				Sinergitas Rekomendas Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)			Tahun		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	6	300	
				Sosialisasi Norma dan Aturan Jasa Konstruksi			Orang		100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	590	